



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**SOLIDARITAS MASYARAKAT MENENGAH PERKOTAAN
DI PERUMAHAN IKATAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI
BINTARO JAKARTA SELATAN DALAM MENGHADAPI
BENCANA BANJIR**

TESIS

MOCHAMAD GUNTUR

NPM : 120150203020

**FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL
PROGRAM STUDI MANAJEMEN BENCANA
UNTUK KEAMANAN NASIONAL**

BOGOR

OKTOBER 2017



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**SOLIDARITAS MASYARAKAT MENENGAH PERKOTAAN
DI PERUMAHAN IKATAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI
BINTARO JAKARTA SELATAN DALAM MENGHADAPI
BENCANA BANJIR**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister dalam bidang ilmu Pertahanan

MOCHAMAD GUNTUR

NPM : 120150203020

**FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL
PROGRAM STUDI MANAJEMEN BENCANA
UNTUK KEAMANAN NASIONAL**

BOGOR

OKTOBER 2017

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Mochamad Guntur
NPM : 120150203020
Program Studi : Manajemen Bencana untuk Keamanan Nasional
Judul Tesis : Solidaritas Masyarakat Menengah Perkotaan di
Perumahan Ikatan Koperasi Pegawai Negeri Bintaro
Jakarta Selatan Dalam Menghadapi Bencana Banjir

Tesis berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan pada Program Studi Manajemen Bencana untuk Keamanan Nasional, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

DEWAN PENGUJI


Pembimbing I : Prof. Dr. Syamsul Maarif, M.Si


(.....)

Pembimbing II : Ir. Sugeng Tri Utomo, DESS


(.....)

Penguji I : Kol. Laut (KH) Dr. Freddy J.
Rumambi, M.M


(.....)

Penguji II : Kol. Kes. Dr. IDK Kertawidana,
S.KM., M.KKK


(.....)

Penguji III : Kol. Laut (KHW) Dra. Christine S.M.,
M.A.P


(.....)

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 06 Oktober 2017

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab, atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Bogor, 06 Oktober 2017



Mochamad Guntur

4.1

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Pertahanan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Guntur
NPM : 120150203020
Program Studi : Manajemen Bencana untuk Keamanan Nasional
Fakultas : Keamanan Nasional
Jenis Karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**SOLIDARITAS MASYARAKAT MENENGAH PERKOTAAN DI
PERUMAHAN IKATAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI BINTARO
JAKARTA SELATAN DALAM MENGHADAPI BENCANA BANJIR**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Pertahanan Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai Pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Dibuat di : Bogor

Pada tanggal : 06 Oktober 2017



Yang menyatakan

Mochamad Guntur
Mochamad Guntur

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga segala usaha yang dilakukan guna penyelesaian tesis ini selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Peneliti menyadari tanpa ada dukungan dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu, dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan yang tak terhingga kepada:

1. Letjen TNI. Dr. I Wayan Midhio, M.Phil sebagai Rektor Universitas Pertahanan serta Laksamana Muda TNI Dr. Siswo Hadi Sumantri, ST.,M.MT selaku Dekan Fakultas Keamanan Nasional, yang senantiasa memberikan pengarahan dan dukungan.
2. Prof. Dr. Syamsul Maarif, M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 dan Ir. Sugeng Tri Utomo, DESS selaku Dosen Pembimbing 2. Terima kasih telah memberikan bimbingan, arahan, pengajaran, semangat, dan berbagai dukungan lain dengan penuh kesabaran sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Beliau-beliau adalah guru terbaik dan panutan dalam kehidupan saya pribadi. Terima kasih juga telah berbagi ilmu dan meluangkan waktu dengan penulis untuk berkonsultasi.
3. Rasa hormat dan sayang penulis ucapkan kepada Ibunda tercinta beserta keluarga atas kasih sayang dan dukungan yang tidak pernah henti, terutama doa dan moril.
4. Semua narasumber yang dengan sukarela meluangkan waktunya untuk dimintai keterangan di sela-sela tugas dan rutinitas sehari-hari.
5. Seluruh mahasiswa Program Studi Manajemen Bencana *Cohort 6*. Terima kasih telah menjadikan dunia kampus lebih berwarna dan layak dikenang selamanya.

6. Ses Prodi Manajemen Bencana, Kolonel Kes Kolonel Kes Dr. IDK Kertawidana, SKM.,M.KKK yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.
7. Para pejabat, dosen dan segenap civitas akademika Unhan yang selalu memberikan dorongan dan memfasilitasi kegiatan akademis selama proses belajar mengajar.

Semoga Allah S.W.T senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya bagi kita semua. Atas seluruh bantuan dan dukungan yang diberikan selama ini, peneliti mengucapkan terima kasih. Peneliti menyadari masih terdapat cukup banyak kekurangan dalam penulisan ini. Oleh karena itu, peneliti sangat berterimakasih atas koreksi, saran, dan masukan yang membangun selama penyusunan tesis ini. Harapan peneliti semoga tesis ini menjadi proses pembelajaran bagi peneliti untuk lebih menambah wawasan dan semoga tesis ini juga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi siapapun yang membutuhkannya.

Bogor, Oktober 2017



Mochamad Guntur

ABSTRAK

Nama : Mochamad Guntur
NPM : 120150203020
Program Studi : Manajemen Bencana untuk Keamanan Nasional
Judul Tesis : Solidaritas Masyarakat Menengah Perkotaan di Perumahan Ikatan Koperasi Pegawai Negeri Bintaro Jakarta Selatan Dalam Menghadapi Bencana Banjir

Setiap negara pasti memiliki pertahanan untuk melindungi kedaulatannya. Setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib berperan dalam upaya pertahanan negara dengan bentuk kerjasama antara sipil dan militer. Bencana alam dapat mempengaruhi pertahanan suatu negara. Untuk itu, diperlukan kesadaran (*sense of unity*) yang kuat dari masyarakat untuk saling bahu membahu dalam penanggulangan bencana. Jakarta merupakan pusat perekonomian dan pemerintahan yang membutuhkan perhatian lebih terutama dalam hal pertahanan negara. Peneliti mengamati bahwa solidaritas merupakan persoalan dasar dalam menjalankan kehidupan sosial bermasyarakat serta rasa gotong royong masyarakat menengah terkadang sering terabaikan oleh masyarakat ibukota yang memiliki ciri individualis tinggi dalam sosial bermasyarakat. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), Jakarta termasuk wilayah dengan risiko banjir tinggi. Penelitian ini berlokasi di Perumahan IKPN yang berada di wilayah Bintaro. Berangkat dari hal itu, penulis merasa perlu meneliti persoalan penanggulangan banjir yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di Jakarta. Penulis berupaya untuk mencari akar persoalannya dan merekomendasikan langkah-langkah konkrit untuk menciptakan sinergitas masyarakat dalam penanggulangan bencana demi mewujudkan pertahanan nasional.

Untuk membantu kelancaran serta fokus penelitian yang komprehensif, maka penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif naratif sebagai pisau analisis. Setelah penelitian ini dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa Keberhasilan pengurangan risiko dengan mengedepankan masyarakat sebagai kunci dan sumber utama berjalan efektif, dengan terbangunnya suatu komunitas/paguyuban ini membuktikan adanya rasa solidaritas antara individu.

Kata kunci: gerakan solidaritas masyarakat, masyarakat menengah perkotaan, banjir, modal sosial

ABSTRACT

Name : Mochamad Guntur
NPM : 120150203020
Program : Disaster Management for National Security
Tesis : The Solidarity of Urban Middle Class Society in Housing of Government Employees Association in Bintaro West Jakarta Facing Flood Disaster

Every country must have defense to protect its sovereignty. Every citizen of Indonesia has the right and duty to take a part of the defense through civil and military cooperation. Natural disaster can affect the defense of a country. Therefore, strong sense of unity from the society is needed to work together in disaster management. Jakarta as a city where main economy activity and government taken place should be payed more attention especially related to state defense. Researcher observed that solidarity is a basic problem in society social life and gotong royong (team work) in middle class society is often neglected by the capital society who has high individualistic character. According to Indonesia Disaster Risk Index by BNPB, Jakarta has a high risk in flooding and this research located in the Housing of Government Employees Association, Bintaro. From that point, researcher needs to conduct a research on floods management problem which is implemented by the society, especially in Jakarta. Researcher tried to find the root problem and gave concrete reccomendations to create a synergy in society in disaster management to achieve national defense.

To help the research continuity and focus, researcher uses narrative qualitative research approach to analyze. After this research is conducted, researcher concluded that a successful disaster risk reduction by promoting society as the key and main source proven to be effective, with the establishment of this community also proven the solidarty among individuals

Keywords: community solidarity movement, urban middle class, flood, social capital

2.1.1.2 Bentuk Gerakan Solidaritas	15
2.1.1.3 Yang Mempengaruhi Solidaritas.....	16
2.1.1.4 Solidaritas Merupakan Bagian Dari Modal Sosial	18
2.1.2 Masyarakat.....	19
2.1.2.1 Stratifikasi Masyarakat	20
2.1.2.2 Masyarakat Sebagai Komunitas.....	23
2.1.3 Bencana Banjir.....	25
2.1.4 Keamanan Nasional Dalam Kebencanaan.....	27
2.2 Penelitian Terdahulu	28
2.3 Kerangka Pemikiran	32
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Desain Penelitian.....	33
3.2 Sumber Data/Subjek/Objek Penelitian.....	34
3.2.1 Sumber Data Penelitian.....	34
3.2.2 Subjek Penelitian.....	34
3.2.3 Objek Penelitian.....	35
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.3.1 Wawancara Mendalam	35
3.3.2 Observasi.....	36
3.3.3 Dokumentasi.....	36
3.4 Teknik Analisa Data.....	37
3.5 Prosedur Penelitian.....	40
3.5.1 Instrumen Penelitian.....	40
3.5.2 Data Primer.....	43
3.5.3 Data Sekunder.....	43
3.5.4 Pengujian Keabsahan Dan Keterandalan Data.....	43
BAB 4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	45
4.1.1 Lokasi Pengumpulan Data.....	45
4.1.2 Profil Kebencanaan.....	47

4.1.3 Sistem Pengendalian Banjir Sungai Pesangrahan.....	50
4.1.4 Gambaran Umum Partisipan.....	53
4.2 Analisis Data Dan Interpretasi Hasil.....	54
4.2.1 Solidaritas Masyarakat Menengah Dalam Menghadapi Bencana Banjir.....	54
4.2.2 Bentuk Solidaritas Masyarakat Dan Partisipasi Masyarakat.....	54
4.2.3 Perbedaan Solidaritas Masyarakat Menengah Dengan Masyarakat Desa.....	56
4.2.4 Solidaritas Sebagai Modal Sosial.....	58
4.2.5 Sistem Informasi Banjir.....	59
4.2.6 Respon Siaga Banjir Dan Peran Pemerintah.....	63
4.3 Pembahasan.....	69
4.3.1 Solidaritas Masyarakat Menengah Dalam Menghadapi Bencana Banjir.....	69
4.3.2 Bentuk Solidaritas Masyarakat Dan Partisipasi Masyarakat.....	70
4.3.3 Perbedaan Solidaritas Masyarakat Menengah Dengan Masyarakat Desa.....	71
4.3.4 Solidaritas Sebagai Modal Sosial.....	74
4.3.5 Sistem Informasi Banjir.....	76
4.3.6 Respon Siaga Banjir Dan Peran Pemerintah.....	77
BAB 5. SIMPULAN DAN SARAN.....	79
5.1 Kesimpulan.....	79
5.1.1 Solidaritas Masyarakat Menengah Perkotaan Dalam Menghadapi Bencana Banjir.....	79
5.1.2 Respon Siaga Banjir Dan Peran Pemerintah Sebagai Stakeholder.....	80
5.2 Saran.....	80
5.2.1 Saran Teoretis.....	80
5.2.2 Saran Praktis.....	81

DAFTAR PUSTAKA.....
LAMPIRAN 1.....
LAMPIRAN 2.....

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik Kejadian Bencana Banjir Per Kotamadya Di DKI Jakarta Dalam Kurun Waktu 1996/2016.....	4
Gambar 2.1	Prinsip Dasar Pengendalian Air.....	27
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran Penelitian.....	32
Gambar 3.1	Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif.....	36
Gambar 4.1	Ilustrasi Tanah Perumahan Ikpn Berbentuk Cekungan.....	44
Gambar 4.2	Profile Kota Jakarta Selatan.....	45
Gambar 4.3	Peta Rawan Bencana Pupr.....	48
Gambar 4.4	Mekanisme Penyampaian Informasi.....	57
Gambar 4.5	Tindakan Dalam Kondisi Darurat.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Banjir Perumahan Ikpn Berdasarkan Tahun.....	5
Tabel 2.1	Perbedaan Solidaritas Mekanik Dengan Solidaritas Organik	13
Tabel 2.2	Kriteria Penduduk Berdasarkan Pengeluaran Per Kapita Menurut ADB.....	23
Tabel 2.3	Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 3.1	Daftar Sumber Data Penelitian.....	34
Tabel 3.2	Subjek, Instansi, Dan Informasi Yang Dibutuhkan.....	35
Tabel 3.3	Instrumen Penelitian John Twigg.....	39
Tabel 4.1	Partisipan Penelitian.....	50
Tabel 4.2	Solidaritas Mekanik Dan Organik.....	54

DAFTAR SINGKATAN

ADB	Asian Development Bank
BBWSCC	Badan Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
CIMIC	Civil Military Cooperation
DAS	Daerah Aliran Sungai
DIBI	Data dan Informasi Bencana Indonesia
EWS	<i>Early Warning System</i>
EXIM	Expor Impor Indonesia
FKDM	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
IKIP	Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
IKPN	Ikatan Koperasi Pegawai Negeri
IRBI	Indeks Risiko Bencana Indonesia
KOARMABAR	Komando Armada Barat
KODIM	Komando Distrik Militer
KOPRO	Komandan Proyek
KORAMIL	Komando Rayon Militer
MABES	Markas Besar
NGO	Non-Governmental Organization
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
OMP	Operasi Militer Perang
OMSP	Operasi Militer Selain Perang
PBB	Perdamain Bangsa Bangsa
POSKO	Pos Komando
PPSU	Penanganan Prasarana dan Sarana Umum
PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RT	Rukun Tetangga
RW	Rukun Warga
SAR	<i>Search and rescue</i>
SDA	Sumber Daya Alam

SDN	Sekolah Dasar Negeri
SK	Surat Keputusan
SMA	Sekolah Menengah Atas
STO	Sekolah Tinggi Olahraga
SUDIN	Suku Dinas
TNI	Tentara Nasional Indonesia
UMR	Upah Minimum Regional
UN-ISDR	<i>United Nations International Strategy for Disaster Reduction</i>
UNJ	Universitas Negeri Jakarta
UPK	Unit Pengelolaan Kegiatan
UUD	Undang Undang Dasar

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara.....
Lampiran 2	Hasil Transkrip Wawancara.....

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Setiap negara pasti memiliki pertahanan untuk melindungi kedaulatannya. Salah satu fungsi pemerintahan negara adalah terselenggaranya pertahanan keamanan negara. Pertahanan merupakan segala upaya dalam suatu negara untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Pertahanan bukan hanya sekedar kekuatan militer dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah semata, melainkan esensi dari pertahanan adalah perlindungan terhadap warga negara menjadi sesuatu yang sangat penting. Hal ini sesuai dengan tujuan nasional yang termuat dalam UUD 1945, yaitu melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

Upaya pertahanan Indonesia pada hakikatnya bersifat semesta. Hal ini sesuai dengan Buku Putih Pertahanan yang dikeluarkan oleh (Kementerian Pertahanan, 2015) yang menyebutkan bahwa dalam mempertahankan kedaulatan negara juga melibatkan seluruh komponen warga negara sesuai peran dan fungsinya. Upaya pertahanan merupakan bentuk dari hak dan kewajiban warga dalam membela negaranya. Ketika ancaman terjadi dari luar dan bersifat militer maka Tentara Nasional Indonesia (TNI) ditempatkan sebagai komponen utama dalam pertahanan negara, sedangkan masyarakat menjadi komponen pendukung maupun komponen cadangan sesuai peran dan fungsinya. Apabila terjadi ancaman yang tidak bersifat militer, maka masyarakat profesional yang menjadi unsur utama sedangkan TNI sebagai unsur pendukung (UU no.3,2002)

Keterlibatan setiap warga negara didasari atas rasa kecintaan kepada tanah air yang diorientasikan terhadap cita-cita bersama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Hal ini menjelaskan bahwa setiap

warga negara Indonesia berhak dan wajib berperan dalam upaya pertahanan negara dengan bentuk kerjasama antara sipil dan militer.

Bencana alam dapat mempengaruhi pertahanan suatu negara. Manajemen bencana yang baik diperlukan untuk meminimalisir dampak dari bencana tersebut. Sesuai dengan kebijakan pertahanan negara tahun 2015 dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia, bahwasannya pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan, keutuhan dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan. Untuk itu, perlu upaya dalam meminimalisir dampak dari bencana dengan melibatkan seluruh masyarakat Indonesia.

Buku Putih Pertahanan Indonesia menjelaskan bahwa bencana alam salah satu bentuk ancaman nirmiliter yang dapat mengganggu keselamatan umum. Hal ini disebabkan dampak bencana dapat mengancam keselamatan masyarakat, baik jiwa maupun harta benda. Oleh karena itu, segala sesuatu yang mengancam keselamatan jiwa maupun harta benda baik dari faktor eksternal maupun internal menjadi permasalahan pertahanan secara global. Terlebih lagi jika bencana tersebut terjadi di ibukota yang notabene merupakan tempat penyelenggaraan pemerintahan negara.

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) telah menghasilkan kajian yang dikenal dengan Astragatra. Kajian ini memandang ketahanan nasional dari sisi geografi, demografi, Sumber kekayaan alam yang juga disebut Trigatra, sedangkan kajian pada sisi ideologi, politik, teknologi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan yang disebut sebagai Pancagatra. Dalam konteks ini, pemerintahan negara tentunya menjadi pusat pertahanan, dan terganggunya penyelenggaraan negara akibat bencana mengakibatkan kerentanan dalam keamanan nasional. Untuk itu diperlukan kesadaran yang kuat dari masyarakat untuk saling bahu membahu dalam penanggulangan bencana.

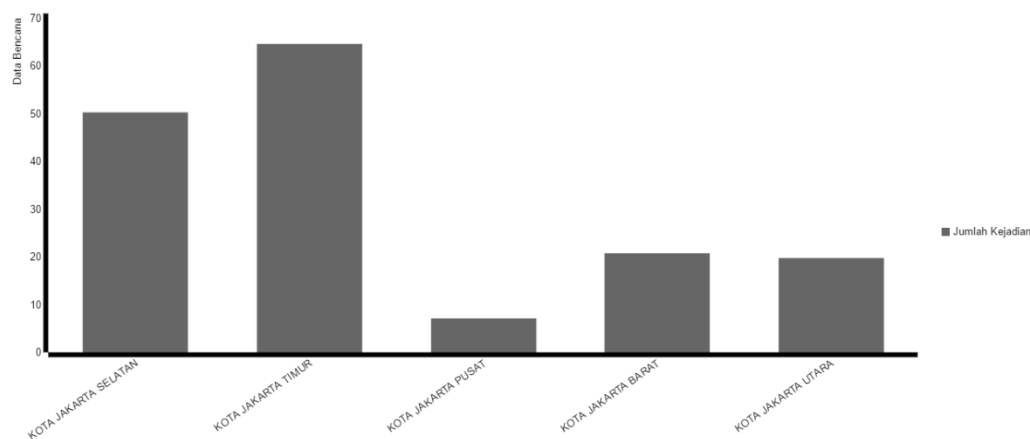
Jakarta merupakan pusat perekonomian dan pemerintahan yang membutuhkan perhatian lebih terutama dalam hal pertahanan negara. Pos-pos pertahanan seperti Komando Armada Kawasan Barat

(Koarmabar), Markas Besar (Mabes) TNI, maupun alutsista banyak berada di Jakarta agar mudah terjangkau apabila terdapat ancaman baik militer maupun non militer. Kekuatan partisipasi masyarakat menjadi ujung tombak pertahanan negara yang berbasis dengan strategi pertahanan semesta. Masyarakat yang solider dapat memaksimalkan kekuatan pertahanan negara secara global maupun dalam penanggulangan bencana. Hal ini dilakukan untuk membangun kesolidaritasan masyarakat Jakarta agar kepedulian menjadi *trendsetter* dan dapat diikuti oleh masyarakat di kota lain.

Secara geografis Jakarta terletak di dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 8 meter dpl. Selain itu, Jakarta merupakan daerah hilir yang dilintasi oleh 13 sungai. Keadaan ini menyebabkan Jakarta berpotensi banjir. Ditambah dengan tingginya arus urbanisasi dan bangunan liar yang berdiri di bantaran sungai. Hal ini memperburuk keadaan banjir di Jakarta.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dikeluarkan BNPB, Jakarta termasuk wilayah dengan risiko banjir tinggi. Sebelum tahun 1970, ancaman banjir yang terjadi di Jakarta murni disebabkan oleh faktor alam, namun pasca periode tersebut penyebab banjir menjadi lebih kompleks. Faktor sosial, ekonomi, dan budaya turut menjadi penyebab terjadinya banjir (Nugroho, 2008). Artinya, kondisi geografis Jakarta ditambah dengan perilaku masyarakat yang tidak ramah lingkungan semakin meningkatkan risiko terjadi banjir.

Banjir Jakarta bukan menjadi hal baru bagi warga Jakarta. Sejarah mencatat bahwa banjir besar yang pernah terjadi di Jakarta pada tahun 1621, 1654, 1918, 1942, 1978, 1996, 2002, dan 2007 (Nugroho, 2008). Meskipun beberapa kali dilanda banjir, hal ini tidak menyurutkan semangat urbanisasi di Jakarta. Pertumbuhan penduduk yang signifikan menyebabkan masyarakat Jakarta berada dalam kemajemukannya.



Gambar 1.1 Grafik Kejadian Bencana Banjir Per Kotamadya di DKI Jakarta dalam Kurun Waktu 1996-2016

Sumber: DIBI BNPB, 2016

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bencana banjir yang terjadi dalam kurun waktu 1996-2016 banyak terjadi di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Umumnya banjir terjadi di kawasan padat penduduk dan bantaran kali yang kumuh. Namun banjir yang terjadi di Jakarta Selatan justru berada di kalangan masyarakat menengah yang bertempat tinggal di rumah tertata (perumahan) seperti banjir yang berada di perumahan Ikatan Koperasi Pegawai Negeri (IKPN) Bintaro kerap dilanda banjir.

Dalam menghadapi bencana banjir, masyarakat ibukota dalam hal ini sebagai masyarakat perkotaan, biasanya memiliki sikap yang individual, egois, dan penuh kemewahan (Jamaludin, 2015). Partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan dan perlu dilibatkan baik pada masa pra, saat, maupun pasca bencana untuk normalisasi keadaan berbagai lapisan masyarakat.

Pengembangan kapasitas perlu diperhatikan dalam penanggulangan bencana. Salah satu pilar utama dalam sistem penanggulangan bencana Indonesia adalah pengembangan kapasitas dalam arti luas, meliputi kapasitas pemerintah, masyarakat, dunia usaha, sektor swasta, dan masyarakat akademisi melalui kerjasama dalam mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana (Maarif, 2012).

Pembangunan kapasitas dipandang penting untuk membentuk modal sosial masyarakat.

Masyarakat menengah merupakan strata sosial dalam masyarakat, yang berada diantara masyarakat atas dan masyarakat bawah. Peneliti berpendapat bahwa masyarakat dikatakan berada dalam strata menengah jika memiliki pekerjaan yang tetap, berpenghasilan (diatas UMR), dan memiliki tempat tinggal. Berdasarkan indikator di atas, masyarakat yang bermukim di di Perumahan Ikatan Koperasi Pegawai Negeri (IKPN) Jakarta dapat dikatakan termasuk strata masyarakat menengah.

Tabel 1.1 Banjir Perumahan IKPN berdasarkan Tahun

TAHUN	KETINGGIAN	RW	RT	KET
2009	100-200 cm	04	05	http://nasional.kompas.com/read/2009/04/09/04192295/sebagian.Jakarta.banjir .
2010	150 cm	04	05	https://m.tempo.co/read/news/2010/08/18/057271997/banjir-masih-landa-ikpn-bintaro
2011	-	-	-	Tidak terjadi banjir
2012	100 -300cm	04	01,04,05	https://www.merdeka.com/Jakarta/kompleks-ikpn-bintaro-masih-terendam-banjir-15-meter.html
2013	30-60 cm	04	05	https://m.tempo.co/read/news/2013/02/14/214461276/genangan-air-di-ikpn-bintaro-berangsur-turun
2014	50 -150 cm	04	05	http://www.rmol.co/read/2014/01/15/139961/2/Bermain-di-Tengah-Banjir-
2015	-	-	-	Tidak terjadi banjir
2016				Tidak terjadi banjir
2017				Tidak terjadi banjir

Sumber: Kompilasi dari berbagai sumber, 2016

Dari tabel diatas dapat diketahui hampir setiap tahun Perumahan IKPN terkena banjir namun di tahun 2011 dan 2015 perumahan tersebut tidak mengalami banjir. Dengan ini peneliti menduga bahwasanya adanya kenaikan kapasitas masyarakat berupa solidaritas yang terbentuk, dengan intensitas banjir yang cukup tinggi. Hal ini mendorong terbentuknya upaya-upaya ketangguhan dalam menghadapi bencana banjir.

Upaya masyarakat IKPN sebagai masyarakat menengah dipandang penting dan sangat berpotensi menjadi roda penggerak untuk mempengaruhi masyarakat lainnya terkait dengan solidaritas masyarakat akan bencana. Peneliti menganggap masyarakat bawah dapat memberikan bantuan dukungan secara moril dalam bertindak maupun sikap dengan mempererat tali persaudaraan satu tanah air (*sense of unity*). Di sisi lain, masyarakat atas dapat memberikan dukungan secara materi maupun kebijakan terhadap bencana. Disinilah fleksibilitas masyarakat menengah memberikan pengaruh terhadap masyarakat bawah dan masyarakat atas, khususnya di Jakarta yang menjadi pusat dari kemajemukan Indonesia.

Peneliti menganggap rasa solidaritas antar masyarakat perlu dibangun dan dikembangkan, serta diteliti sejauh mana peran serta seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat menengah terhadap rasa solidaritasnya hingga menuju ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana. Untuk itu, peneliti mengangkat judul **Solidaritas Masyarakat Menengah Perkotaan di Perumahan Ikatan Koperasi Pegawai Negeri Bintaro Jakarta Selatan dalam Menghadapi Bencana Banjir.**

1.2 Rumusan Masalah

Penulis mengamati bahwa persoalan solidaritas merupakan persoalan dasar dalam melaksanakan maupun menjalankan kehidupan sosial bermasyarakat, banyaknya berbagai bantuan yang hadir ditengah musibah bencana alam merupakan buah dari kesadaran masyarakat,

terlebih pada masyarakat menengah sangat aktif memberikan bantuan. Untuk itu peneliti tertarik untuk membahas:

“Bagaimana bentuk solidaritas yang dilakukan oleh masyarakat menengah perkotaan Perumahan Ikatan Koperasi Pegawai Negeri Bintaro Jakarta Selatan dalam menghadapi bencana banjir”.

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perilaku masyarakat menengah Perumahan IKPN dalam menghadapi bencana kejadian bencana banjir dengan “Menganalisis solidaritas masyarakat menengah Perumahan IKPN dalam menghadapi bencana banjir”.

1.3.2 Signifikansi Penelitian

Signifikansi dari penelitian ini, dengan mengetahui solidaritas masyarakat menengah dapat digunakan sebagai modal sosial yang dapat diintegrasikan dengan upaya penanggulangan bencana dalam keamanan nasional.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dalam pengembangan ilmu sosial dan kebencanaan sehubungan dengan strategi pengurangan risiko bencana.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Merumuskan gerakan solidaritas masyarakat terhadap bencana banjir
2. Menjadikan titik tolak bagi kegiatan penelitian lebih lanjut sehingga kegiatan penelitian berjalan berkesinambungan

1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian

Pembatasan masalah penelitian ini bertujuan untuk mempermudah peneliti untuk lebih fokus dalam menganalisis masalah penelitian. Selain itu, pembatasan dilakukan dalam penelitian mengingat terbatasnya waktu, biaya dan tenaga, serta sumber daya lain guna mendukung penelitian ini. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka ruang lingkup penelitian ini meliputi:

1.5.1.1 Ruang Lingkup Substansi

Peneliti mengamati bahwa solidaritas merupakan persoalan dasar dalam menjalankan kehidupan sosial bermasyarakat. Tangguhnya masyarakat ditengah musibah bencana banjir merupakan hasil dari kesadaran masyarakat terhadap bencana alam, terlebih pada masyarakat menengah yang menjadi tolak ukur ketangguhan masyarakat dalam rasa solidariats yang tinggi. Untuk itu, kesadaran masyarakat menengah perlu dibangun dan dikembangkan melalui rasa gotong royong dalam menanggulangi bencana.

Rasa gotong royong masyarakat menengah terkadang sering terabaikan oleh masyarakat ibukota yang memiliki ciri individualis tinggi dalam sosial bermasyarakat. Untuk itu, perubahan solidaritas mekanik menjadi solidaritas organik pada strata sosial menjadi sangat menarik untuk diteliti, namun tetap tidak menyamaratakan perbedaan sifat dalam masyarakat.

1.5.1.2 Ruang Lingkup Spasial

Penelitian ini berlokasi di Perumahan IKPN yang berada di wilayah Bintaro, Jakarta Selatan. Lokasi ini dipilih karena perumahan tersebut merupakan perumahan para pegawai negeri yang seharusnya sudah melewati kajian dalam pembangunannya namun masih memiliki potensi banjir setiap tahunnya.

1.5.2 Gambaran Desain Penelitian

Proses pengumpulan dan klasifikasi data dalam tesis ini menyangkut pada materi-materi yang berhubungan dengan solidaritas yang dilakukan oleh masyarakat menengah. Kemudian setelah melakukan interpretasi dan analisis, maka peneliti mendapatkan kesimpulan yang menjadi target dalam penulisan tesis ini.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif naratif yaitu sebuah rancangan penelitian tentang kemanusiaan (Cresswell, 2016). Peneliti mempelajari tentang kehidupan individu dan meminta seseorang atau sekelompok untuk menceritakan kembali kehidupan mereka agar dapat mengeksplorasi dan memahami makna sejumlah orang/sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial (Riessman, 2008). Dalam penelitian naratif peneliti mencoba untuk menganalisis hasil dari cerita pengalaman partisipan yang pernah dialaminya yang kemudian dinarasikan kembali ke dalam sebuah tulisan.

Untuk teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara para tokoh-tokoh masyarakat yang terkait dengan banjir dan gerakan sosial, observasi data primer maupun sekunder yang terdapat dalam masyarakat IKPN, dan dokumentasi sebagai bukti keabsahan dari penelitian ini. Data yang terkumpul melalui ketiga teknik tersebut diolah melalui klasifikasi dan seleksi data. Kemudian data dianalisis dalam dua tahap, pertama analisis data selama di lapangan dan kedua analisis data setelah terkumpul.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Gerakan Solidaritas

2.1.1.1 Pengertian Gerakan Solidaritas

Solidaritas berasal dari kata “solid” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan kuat, kokoh, sedangkan secara istilah solidaritas adalah perasan (*solider*) setiakawan yang berarti suatu perasaan memiliki atau rasa sepenanggungan. Solidaritas merupakan keadaan hubungan kesetiakawanan antara individu dan/atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama, dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama (Durkheim *dalam* Lawang, 1994:181). Solidaritas terbentuk karena timbulnya perasaan setia kawan dan kesadaran sosial bermasyarakat untuk saling peduli antar satu sama lainnya, dengan sifat kesetiakawanan, gotong royong, dan saling membantu.

Kesadaran masyarakat yang tinggi diperlukan untuk membangun rasa solidaritas. Menurut Marx, kesadaran berakar pada perilaku manusia yang bersifat sosial. Dapat dikatakan, kesadaran tidak menentukan eksistensi seseorang, namun sebaliknya kehidupan sosial yang menentukan kesadaran mereka. Dalam kehidupan bermasyarakat, kesadaran individu dibutuhkan untuk membentuk kesadaran kolektif. Giddens (1973) membagi kesadaran menjadi empat dimensi, yaitu:

1. Volume adalah sejumlah orang yang diikat bersama oleh suatu kesadaran kolektif.
2. Kekuatan adalah bagaimana individu individu merasakan kesadaran kolektif tersebut.
3. Kejelasan adalah bagaimana semua itu dapat didefinisikan dengan jelas.
4. Isi adalah bentuk yang dihasilkan oleh kesadaran kolektif dalam kedua tipe masyarakat

Berdasarkan dimensi tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran tidak dapat dibangun dengan sendirinya, akan tetapi kesadaran individu mempengaruhi perubahan kesadaran secara kolektif. Salah satunya dengan cara membangun tujuan, visi, dan misi yang jelas sehingga memiliki satu tujuan yaitu terciptanya kesadaran secara kolektif..

Dalam buku *The Division Of Labour*, Durkheim membuat analisis komparatif mengenai masyarakat yang termasuk dalam masyarakat desa atau kota. Masyarakat desa maupun kota memiliki tingkat kesadaran yang berbeda. Untuk itu, Durkheim membagi ke dalam dua tipe solidaritas, yaitu solidaritas masyarakat pedesaan/mechanic dan solidaritas masyarakat perkotaan/organik. Hal ini didasarkan pada analisis bahwa masyarakat desa disatukan oleh fakta sosial non material, khususnya oleh kuatnya ikatan moralitas bersama, atau yang disebut sebagai kesadaran kolektif. Tetapi, kompleksitas masyarakat kota telah menurunkan kekuatan kesadaran kolektif. Ikatan utama dalam masyarakat kota adalah pembagian kerja yang rumit, yang diikat dalam hubungan saling tergantung. Sementara itu, masyarakat pedesaan dipandang memiliki kesadaran yang sangat kuat yang berupa pemahaman, norma, dan kepercayaan yang sama (Giddens, 1986).

Solidaritas mekanik adalah solidaritas sosial yang didasarkan pada suatu kesadaran kolektif (*collective consciousness*) bersama yang menunjuk pada totalitas kepercayaan-kepercayaan dan sentimen-sentimen bersama yang rata-rata ada pada warga masyarakat yang sama itu (Giddens, 1986). Ikatan utamanya berbentuk kepercayaan bersama, cita-cita, dan komitmen moral. Solidaritas organik adalah solidaritas yang muncul dari ketergantungan antara individu atau kelompok yang satu dengan yang lainnya akibat spesialisasi jabatan (pembagian kerja).

Terbangunnya solidaritas berdasarkan perasaan simpati masyarakat terhadap masyarakat lainnya, dan setiap stratifikasi masyarakat memiliki tingkat sosial yang berbeda. Durkheim membagi kelompok yang didasarkan pada solidaritas sosial, yaitu suatu keadaan dimana hubungan antara individu dan kelompok berdasarkan perasaan

kepercayaan (Soekanto, 2016). Terbangunnya tingkat kepercayaan masyarakat mempengaruhi solidaritas. Begitu pula dengan perbedaan tingkat kepercayaan masyarakat pedesaan dan perkotaan, masyarakat pedesaan yang lebih sederhana cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat perkotaan.

Perbedaan masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan yakni, masyarakat desa cenderung tidak memikirkan rasa gengsi dan memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi. Misalnya kerja bakti pembangunan dan perawatan sarana umum, gotong royong membersihkan lingkungan, siskamling, bahkan acara tujuh harian, dan empat puluh harian. Dalam hal pemikiran, masyarakat desa lebih sederhana tidak menggunakan teknologi yang canggih. Hal ini disebabkan tidak dimilikinya sarana dan prasarana yang memadai karena keterbatasan keuangan untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Berbeda dengan masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan pada umumnya memiliki tingkat kegengsian yang tinggi, sulit untuk menemukan rasa solidaritas yang tinggi, serta memiliki tingkat pemikiran, pergaulan, pekerjaan yang mungkin berbeda dengan masyarakat desa. Hal ini disebabkan karena kondisi daerah yang lebih maju dan modern sehingga mudah untuk mendapatkan suatu hal yang diharapkan dan diinginkan. Ketersediaan fasilitas yang lengkap dan cenderung disibukkan dengan padatnya waktu untuk bekerja.

Solidaritas masyarakat perkotaan biasanya memiliki sifat mementingkan diri sendiri, atau sikap hidup yang individualis. Dalam kehidupan bermasyarakat, tingginya tingkat persaingan baik dalam pekerjaan, *financial*, maupun eksistensi, menyebabkan masyarakat kota cenderung individual. Rasa kenyamanan, ketenteraman, damai sulit untuk ditemukan karena persaingan masyarakat perkotaan untuk mengejar eksistensi diri.

Tabel 2.1 Perbedaan Solidaritas Mekanik dengan Solidaritas Organik

CIRI	SOLIDARITAS MEKANIK	SOLIDARITAS ORGANIS
Aktivitas sosial utama	-homogen -konsensus moral dan agama -saling ketergantungan rendah -bersifat primitif atau pedesaan	-heterogen -Konsensus pada nilai nilai abstrak -saling ketergantungan tinggi -bersifat industrial-perkotaan
Posisi individu	-kolektivisme, komunitas -menanamkan pada kelompok	-individualisme -menekankan otonomi individu
Struktur ekonomi	-kelompok terisolasi -pembagian kerja rendah -mencukupi kebutuhan	-terbuka terhadap inovasi -pembagian kerja tinggi -pertukaran antar kelompok
Kontrol sosial	-keterlibatan komunikasi dalam menghukum	-badan badan kontrol sosial yang menghukum orang yang menyimpang

Sumber: Johnson dalam Zulkarnaen 2009

Walaupun terdapat perbedaan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan yang cukup tinggi namun, adanya hubungan yang sangat erat antara keduanya. Keduanya memiliki bersifat ketergantungan dan saling membutuhkan (Soekanto, 2016). Namun muncul adanya fenomena masyarakat menengah yang memiliki ciri diantara masyarakat mekanik

dan organik secara tidak utuh. Kota tergantung pada desa untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan dan kebutuhan yang dihasilkan dari pedesaan, dan masyarakat desa juga merupakan sumber tenaga kasar.

Klasifikasi dapat dibedakan dengan melihat sifat pokok masyarakat sehingga dapat mengetahui solidaritas yang ada pada kelompok masyarakat tersebut (Kinloch dalam Kahmad, 2005:92). Durkheim mengklasifikasi masyarakat ke dalam dua bagian, yaitu dengan membandingkan sifat-sifat pokok dari masyarakat yang didasarkan pada solidaritas mekanik dan organik.

Solidaritas mekanik adalah solidaritas yang terbangun antara sesama manusia yang didasari akar-akar humanisme serta besarnya tanggung jawab dalam kehidupan sesama. Solidaritas tersebut mempunyai kekuatan sangat besar dalam membangun kehidupan harmonis antara sesama. Karena itu, landasan solidaritas tersebut lebih bersifat lama dan tidak temporer. Solidaritas mekanik pada suatu "kesadaran kolektif" bersama, yang menunjuk pada totalitas kepercayaan-kepercayaan dan sentimen-sentimen bersama yang tergantung pada individu-individu yang memiliki sifat-sifat yang sama dan menganut kepercayaan dan pola normatif yang sama pula. Karena itu, individualitas tidak berkembang; individualitas itu terus-menerus dilumpuhkan oleh tekanan yang besar sekali untuk konformitas (Giddens,1986).

Kedua, solidaritas mekanik adalah bentuk hubungan antar sesama selalu dilandaskan pada hubungan sebab akibat (kausalitas), bukan pada kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan. Hubungan yang terjalin lebih bersifat fungsional sehingga lebih temporer sifatnya. Pada tataran lebih luas, solidaritas yang terbangun di dalamnya didasarkan pada kacamata niaga, yang di dalamnya berlaku hukum untung rugi.

Tipe solidaritas yang didasarkan atas kepercayaan dan setia kawan ini diikat oleh Durkheim dengan nama *conscience collective*, yaitu suatu sistem kepercayaan dan perasaan yang menyebar merata pada semua anggota masyarakat. Lambat laun pembagian kerja dalam masyarakat

semakin berkembang sehingga solidaritas mekanik berubah menjadi solidaritas organik (Giddens, 1986). Perubahan solidaritas dapat terjadi berdasarkan sistem kepercayaan yang terbangun dalam masyarakat.

Dalam karya klasiknya, Durkheim membayangkan fakta sosial menurut pengertian normatif. Ia berkata “Bila saya melaksanakan kewajiban sebagai saudara, suami, atau warga negara, bila saya mematuhi janji, maka saya melaksanakan kewajiban yang diterapkan secara eksternal terhadap diri saya sendiri dan tindakan saya adalah menurut hukum dan kebiasaan. Meski norma itu sesuai dengan perasaan saya sendiri dan saya merasakan realitasnya secara subyektif, namun realitas ini masih tetap obyektif, karena saya tak menciptakannya.”

Perbedaan antara masyarakat mekanik dengan organik adalah bahwa dalam masyarakat dengan solidaritas organik, kompetisi yang kurang dan diferensiasi yang tinggi justru menciptakan ikatan yang lebih erat dibandingkan persamaan atau masyarakat mekanik. Masyarakat yang dibentuk solidaritas organik mengarah pada bentuk yang lebih solid dan lebih individual daripada masyarakat yang dibentuk solidaritas mekanik (Rueschemeyer, 1994).

2.1.1.2 Bentuk Gerakan Solidaritas

Bentuk maupun implementasi dari solidaritas adalah terbangunnya rasa saling peduli dengan sifat tolong menolong memiliki bentuk nyata yaitu gotong royong. Gotong royong sebagai sistem sosial merupakan suatu tatanan nilai yang diwujudkan dalam kerja nyata bersifat tolong menolong dalam kehidupan. Bintarto (1980) mengemukakan bahwa gotong royong dilaksanakan oleh sekelompok penduduk di suatu daerah yang datang membantu atau menawarkan tenaga tanpa pamrih atau dengan sukarela menolong secara bersama. Kebersamaan dan sukarela merupakan sistem dua kaki yang mendasari tegaknya gotong royong.

Dalam situasi normal, gotong royong sering mengalami pelemahan dan kurang berfungsi dengan baik (Rijanta *et. al*, 2014).

Sebaliknya, ketika terjadi bencana, sistem sosial ini seperti menemukan energinya kembali, terbangunnya rasa sepenanggungan atau rasa sepenenderitaan menimbulkan empati yang tinggi baik bagi masyarakat terdampak bencana maupun masyarakat pada umumnya. Hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok di masyarakat didasarkan pada kuatnya ikatan perasaan dan kepercayaan yang dianut dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Solidaritas menunjukkan kekompakan untuk berbagi dan saling meringankan beban pekerjaan satu sama lain.

Gotong royong merupakan kombinasi solidaritas dan kerja sama dalam mengatasi masalah besar yang tidak mampu dilakukan. Terbangunnya kesadaran kolektif masyarakat, baik berupa materi maupun tenaga sebagai tatanan sosial, merupakan aksi nyata kerja sama partisipasi masyarakat untuk membantu korban bencana. Aktivitas sukarela untuk berkontribusi dalam suatu keperluan maupun peristiwa, perilaku ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu sehingga telah mengakar pada masyarakat pedesaan (Baiquni, 2014). Pada dasarnya, kegiatan gotong royong sering diterapkan pada dua tingkat kegiatan, yaitu kegiatan rumah tangga dan masyarakat umum. Jiwa gotong royong masyarakat perlu dibangkitkan dalam menghadapi bencana, untuk itu diperlukan komitmen dan pengalaman dalam hal manajemen bencana.

Masyarakat berpartisipasi secara pasif sebagai penerima program, walaupun sangat memungkinkan masyarakat ikut berpartisipasi aktif dan terlibat dalam berbagai kesempatan. Artinya, pelibatan masyarakat dalam kegiatan gotong royong bukan hanya menunggu pembagian tugas yang diberikan, namun kesadaran yang terbangun dan inisiatif yang tinggi diharapkan masyarakat menjadi lebih aktif meskipun solusi tetap datang dari luar.

2.1.1.3 Faktor Yang Mempengaruhi Solidaritas

Solidaritas dalam masyarakat tidak menjadi hal yang mutlak, artinya masyarakat desa tidak selalu menjadi solidaritas mekanik, begitupun sebaliknya pada masyarakat kota tidak selalu menjadi

solidaritas organik. Perubahan atau pergeseran dapat terjadi tergantung pada beberapa faktor, salah satunya adalah perubahan sosial masyarakat. Durkheim meyakini perubahan solidaritas mekanik menjadi solidaritas organik disebabkan oleh dinamika penduduk. Konsep ini merujuk pada jumlah dan banyak interaksi masyarakat.

Tradisi solidaritas yang telah ada pada masyarakat secara terus menerus harus tetap dilestarikan dari generasi ke generasi berikutnya. Akan tetapi, dinamika budaya tidak ada yang statis, dan pasti terjadi beberapa perubahan baik secara eksternal dan internal. Unsur kekuatan yang merubah adalah modernisasi yang telah mempengaruhi tradisi solidaritas sosial. Selain itu, perubahan solidaritas sosial tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Peningkatan jenjang pendidikan anggota keluarga, sehingga dapat berpikir lebih luas dan lebih memahami arti dan kewajiban mereka sebagai manusia.
2. Perubahan tingkat sosial dan corak gaya hidup yang terkadang menciptakan kerenggangan di antara sesama anggota keluarga.
3. Sikap egoistik, bila seseorang individu terlalu mementingkan diri sendiri dan keluarganya, lalu mengorbankan kepentingan masyarakat.

Solidaritas sosial didefinisikan sebagai perasaan yang secara kelompok memiliki nilai-nilai yang sama atau kewajiban moral untuk memenuhi harapan-harapan peran (*role expectation*) (Nasution, 2007). Untuk itu, solidaritas masyarakat diperlukan untuk saling membantu, bergotong royong, dan mendukung peran serta masyarakat di bidang pembangunan, maupun pengelolaan untuk memenuhi kewajiban moral dan harapan.

Surutnya kesadaran kolektif tampak jelas dalam hilangnya arti agama. Dengan demikian, terdapat lebih banyak ruang bagi perbedaan-perbedaan individual. Durkheim mengemukakan, pada waktu yang sama

kesadaran kolektif dalam segi-segi tertentu justru bertambah kuat, yaitu dimana kesadaran kolektif ini memberi tekanan kepada martabat individu.

Perubahan masyarakat berjalan dengan cepat karena meningkatnya pembagian kerja yang menghasilkan suatu kebingungan tentang norma dan semakin meningkatnya sifat yang tidak pribadi dalam kehidupan sosial. Hal ini mengakibatkan runtuhnya norma-norma sosial yang mengatur perilaku, yang disebut juga dengan anomie (Giddens, 1986). Keadaan ini memunculkan segala bentuk perilaku menyimpang, dan yang paling menonjol adalah bunuh diri.

2.1.1.4 Solidaritas Sebagai dari Modal Sosial

Secara literasi, modal sosial berasal dari dua suku kata yaitu modal dan sosial. Dalam buku "*Modal Sosial dalam Bencana*" karangan Rijanta *et. al.*, dijelaskan terdapat dua pemahaman modal sosial yaitu *Classical Theory* dan *Neo Classical Theory*. *Classical Theory* diprakarsai oleh Karl Marx menyatakan bahwa modal sosial merupakan bagian dari nilai lebih antara nilai guna dan nilai tukar dari suatu komoditas. Dalam *Neo Classical Theory* milik Bourdieu, definisi modal sosial merupakan akumulasi dari keuntungan yang diperoleh pekerja dengan melakukan investasi pada keterampilan teknis dan pengetahuan analisis yang dilakukan pada tingkatan individu, sehingga membagi modal menjadi tiga yaitu *human capital*, *cultural capital*, dan *social capital*. Dengan demikian, modal sosial pada dasarnya merupakan hasil dari kemampuan individu terhadap sumber daya dalam berinteraksi. Untuk itu, keterbatasan sumber daya dalam bencana dapat diminimalisir dengan interaksi sosial untuk saling mengisi keterbatasan. Hal ini dapat terjadi dengan membangun kepercayaan yang ada.

Modal sosial memiliki konsep sebagai mekanisme dan hubungan antara kepercayaan, norma, dan jaringan dalam pengaturan sosial di suatu daerah (Woolcock, 1998). Terbangunnya interaksi masyarakat dapat dimanfaatkan dalam manajemen bencana. Adapun unsur-unsur

penting dalam membangun modal sosial antara lain sumber daya, ikatan emosional, dan adanya tujuan utama yang dicapai.

Masyarakat di daerah rawan bencana biasanya beradaptasi dengan situasi agar memiliki strategi dalam bertahan hidup berdasarkan pada sumberdaya yang mereka miliki, termasuk modal sosial (Rijanta *et. al*, 2011). Untuk menjaga kearifan lokal dan nilai tindakan sebagai sumber dan bentuk modal sosial, perlu dilakukan inventarisasi setiap jenis kearifan lokal masyarakat.

Pemikiran yang melandasi dalam strategi menuju ketangguhan antara lain: (1) Jauhkan masyarakat dari bahaya, (2) Jauhkan bahaya dari masyarakat, (3) *Living harmony with risk*, dan (4) Tumbuhkembangkan kearifan lokal.

Penanggulangan bencana secara nasional tidak terlepas dari sistem yang telah dibangun, sehingga penanggulangan bencana dapat dipahami secara komprehensif. Sistem tersebut berguna untuk menuju ketangguhan masyarakat menghadapi bencana. Maarif menjelaskan bahwa masyarakat yang tangguh memiliki ciri-ciri yaitu

1. Memiliki daya informasi
2. Kemampuan antisipasi setiap ancaman atau bahaya yang terjadi. untuk itu diperlukan kemampuan analisis dan prediksi identifikasi dan kajian yang baik terhadap bencana.
3. Kemampuan melawan atau menghindar dari ancaman bahaya tersebut. Kemampuan dalam melawan ini bergantung terhadap besarnya bencana yang kita hadapi.
4. Kemampuan untuk mengadaptasi bencana dan dampak yang ditimbulkan. Apabila tidak mampu untuk melawan dan menghindar maka kita harus mampu mengurangi dampak yang ditimbulkan.
5. Kemampuan untuk pulih kembali kemampuan masyarakat dapat di ketahui ketangguhan melalui daya lenting/ pulih kembali pada pasca bencana.

2.1.2 Masyarakat

Masyarakat terdiri dari berbagai lapisan sosial yang di dalamnya terdapat ragam kelas sosial, status sosial dan strata sosial. Menurut Durkheim masyarakat sebagai kenyataan objektif kumpulan individu dan sebagai struktur yang saling membutuhkan karenanya masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang sakral (Jamaluddin, 2015). Secara fisik orang-orang kota hidup dalam keramaian, tetapi secara sosial mereka hidup berjauhan. Jarak sosial merupakan akibat dari anonimitas, impersonalitas, dan heterogenitas.

Dalam manajemen bencana John Twigg melihat masyarakat sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah yang sama atau terpapar untuk bahaya dan risiko yang sama. Dimensi spasial merupakan elemen penting dalam mengidentifikasi masyarakat yang berisiko, namun harus dikaitkan dengan pemahaman tentang dimensi signifikan lainnya. Dengan mengetahui data spasial di dalam masyarakat memudahkan untuk mengidentifikasinya. Dengan menggunakan teori Durkheim dan Twigg peneliti menjadikan sebagai dasar teori dalam penelitian ini.

2.1.2.1 Stratifikasi Masyarakat

Stratifikasi sosial adalah perbedaan individu atau kelompok dalam masyarakat yang menempatkan seseorang pada kelas-kelas sosial yang berbeda-beda secara hierarki dan memberikan hak serta kewajiban yang berbeda-beda pula antara individu pada suatu lapisan sosial lainnya. Stratifikasi sosial muncul karena adanya sesuatu yang dianggap berharga dalam masyarakat. Sistem stratifikasi merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat, yang diwujudkan dalam kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas rendah (Waluya, 2007)

Stratifikasi terjadi disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga berpengaruh terhadap rasa tanggung jawab yang menipis disusul dengan adanya ketimpangan dari kepemilikan nilai dan harga (Syarbaini, 2004). Hal ini menjadikan perbedaan stratifikasi di dalam masyarakat, baik dalam pekerjaan maupun dalam kepemilikan harta sehingga berpengaruh kepada status sosial

masyarakat. Stratifikasi berarti melihat masyarakat dalam kategori kategori sosial yang tersusun secara hirakis. Artinya ketimpangan sosial merupakan dari pembahan stratifikasi (Nurdin, 2006). Adanya kelompok sosial masyarakat sebagaimana di jelaskan di atas merupakan hasil dari ketimpangan kemampuan masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap interaksi sosial masyarakat.

Setiap status menjalin hubungan relasional satu dengan lain karena sifat relasional status dibebankan dengan tanggung jawab. Pada umumnya masyarakat cenderung berinteraksi dengan persamaan status sosial, karena setiap status sosial masyarakat memiliki jaringan ataupun relasi yang cukup baik. Untuk itu, pengaruh stratifikasi sangat penting yaitu dapat mempengaruhi dalam memperoleh kesempatan (Nurdin, 2006). Hal ini menjadikan Stratifikasi berpengaruh dalam interaksi masyarakat memilih teman bergaul, kelompok sosial, jaringan sosial. Orang yang berada di masyarakat atas cenderung ingin tahu dan bergaul terhadap masyarakat pada strata atas. Hal ini terjadi karena memungkinkan mereka dalam membuka dan mendapatkan akses dengan kelas sesama mereka, sedangkan pada strata bawah biasanya diberlakukan kurang menyenangkan, yaitu dianggap remeh, di kucilkan maupun sampai di jauhkan dari interaksi sosial kelompoknya. Untuk itu, stratifikasi mampu mempengaruhi respon individu dari berbagai kekuasaan terhadap sistem yang mengatur mereka (Nurdin, 2006). Perbedaan tersebut menjadikan ketimpangan sosial masyarakat dalam menjalin interaksi sosial. Hal ini disebabkan oleh prespektif masyarakat itu sendiri.

Stratifikasi sosial memiliki dua sifat, yaitu bersifat tertutup dan bersifat terbuka (Waluya, 2007). Sifat ini menentukan bahwa stratifikasi dapat diberikan kepada individu ataupun tidak.

1. Bersifat tertutup, merupakan stratifikasi yang membatasi seseorang maupun individu untuk berpindah pindah dalam lapisan kelas masyarakat baik berpindah keatas maupun kebawah. Pada umumnya Hal ini terjadi disebabkan oleh faktor keturunan. Untuk

mendapatkan pengakuan menjadi anggota biasanya berdasarkan kelahiran atau yang biasa dikenal dengan kasta.

2. Bersifat terbuka merupakan stratifikasi yang memberikan kesempatan bagi siapapun untuk menjadi bagian dari lapisan kelas tersebut, dan memungkinkan berpindah pindah kelas pada lapisan sosial masyarakat. Tentunya dengan ketentuan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat tersebut.

Adapun untuk mendapatkan suatu pengakuan perbedaan kelas dalam kelompok sosial dapat diukur berdasarkan nilai kumulatif yang berada pada masyarakat tersebut. Dan untuk mendapatkan pengakuan kelas menurut Syarbaini dapat dimiliki melalui kriteria ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan, dan ukuran pendidikan.

Namun sedikit berbeda dengan (Nurdin, 2006) yang berpendapat lebih sederhana bahwa stratifikasi sosial terjadi karena adanya perbedaan kekayaan (*Property*), kehormatan (*Prestise*), dan kekuasaan (*Power*). Baginya, pendidikan tidak termasuk kedalam stratifikasi karena dalam mengukur sebuah prestise berdasarkan jenis pekerjaan yang dianggap prestisius di kalangan masyarakat. Pandangan ini berdasarkan masyarakat Amerika pada awal tahun 90-an, karena pekerjaan yang memiliki prestise yang tinggi membutuhkan kompetensi dan pengalaman pendidikan bagi para pekerjanya. Walaupun masyarakat berpendidikan tinggi namun belum mendapatkan pekerjaan yang prestise maka belum dianggap sebagai masyarakat yang berkelas tinggi, karena pekerjaan yang prestise erat kaitanya dengan penghasilan yang besar.

Nurdin beranggapan bahwa sumber utama dalam ketimpangan sosial adalah dari dimensi ekonomi yang bisa menimbulkan ketimpangan sosial baik dari kekayaan maupun penghasilan. Semakin besar tingkat kekayaan maupun penghasilannya maka semakin tinggi kelas sosialnya. Begitupun sebaliknya, semakin rendah penghasilan/pekerjaan maka semakin rendah kelas sosialnya. Hal ini dilihat dari dimensi ekonomi.

Pengertian kelas adalah kesetaraan kemampuan ekonomi individu-individu dalam suatu kelompok untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup

dan statusnya. Semakin tinggi kemampuan ekonomi suatu kelas untuk memiliki jasa, benda dan lain-lain berarti semakin tinggi kelasnya dalam masyarakat. Kelas menengah ke bawah memiliki kemampuan ekonomi yang terbatas untuk mendapatkan kemewahan selayaknya kelas atas. Hal ini kemudian menjadikan masyarakat terbagi dalam tingkatan-tingkatan sosial (Soekanto, 2016).

Tabel 2.2 Kriteria penduduk berdasarkan pengeluaran per kapita menurut ADB

PENGELUARAN PER KAPITA	KRITERIA
<\$2	Miskin (<i>poor</i>)
\$2.00 - \$4.00	Menengah bawah (<i>Lower Middle</i>)
\$400 - \$10.00	Menengah (<i>Mid Middle</i>)
\$10.00 - \$20.00	Menengah Atas (<i>Upper Middle</i>)
>\$20.00	Kaya

Sumber: ADB dalam Nizar, 2015

Menurut Widiatmanti dalam artikel yang dipublikasikan Badiklat Kemenkeu (2015), dikatakan bahwasanya kelas menengah di Indonesia dapat dikategorikan untuk masyarakat yang berpenghasilan dengan rentang antara 2,6 juta sampai Rp. 6 juta per bulan. Adanya perbedaan dalam menentukan klasifikasi kelas menengah merupakan akibat dari perbedaan bentuk dari pola konsumsi.

2.1.3.2 Masyarakat Sebagai Komunitas

Solidaritas sosial juga dipengaruhi interaksi sosial yang berlangsung karena ikatan kultural, yang pada dasarnya disebabkan munculnya *sentiment community* (Nasution, 2009). Masyarakat yang memiliki interaksi sosial yang baik pada umumnya memiliki sentimen kultural yang menjadikannya sebagai pembangunan rasa solidaritas

Pengertian *community*/komunitas lebih mengarah kepada masyarakat dalam arti paguyuban atau masyarakat dalam artian yang lebih luas. Jika *society* berarti masyarakat umum, komunitas menunjukkan arti masyarakat yang lebih terbatas, misalnya masyarakat Jakarta. Twigg

menjelaskan bahwa komunitas tidak hanya terdiri dari satu orang, memiliki kesamaan homogen, kebereradaan mereka kompleks dan bervariasi. Dengan lingkup yang lebih kecil, komunitas menjadikan ada perbedaan dalam kekayaan, status sosial dan aktivitas kerja, dan pembagian menurut jenis kelamin, etnisitas, umur, agama dan kasta. Ketegangan selalu ada.

Masyarakat yang mempunyai tempat tinggal tetap dan permanen biasanya memiliki ikatan solidaritas yang kuat sebagai pengaruh kesatuan tempat tinggalnya. Selain itu, dapat menimbulkan perasaan saling memerlukan dan terbangun rasa saling memiliki. Terbangunnya perasaan tersebut dikarenakan intensitas komunikasi maupun rasa simpati dalam sosial bermasyarakat. Adapun unsur-unsur perasaan komunitas antara lain:

a. Seperasaan

Unsur seperasaan timbul akibat seseorang berusaha untuk mengidentifikasi dirinya dengan sebanyak mungkin orang didalam kelompok tersebut.

b. Sepenanggungan

Setiap individu sadar akan perannya dalam kelompok dan keadaan masyarakat sendiri memungkinkan perannya, dalam kelompok dijalankan sehingga mempunyai kedudukan yang pasti dalam darah dagingnya sendiri.

c. Saling memerlukan

Individu yang tergabung dalam masyarakat setempat merasakan dirinya tergantung pada komunitasnya yang meliputi kebutuhan fisik dan psikologis.

Komunitas bersifat dinamis: orang terbuka untuk umum sehingga dapat bergabung didalamnya, selama memiliki tujuan sama yang ada didalam masyarakat berguna untuk memperkuat maupun meringankan beban yang ada didalam masyarakat. Contohnya dalam mencari perlindungan rasa aman dan rasa nyaman (Twigg, 2015). Komunitas dapat memberikan solusi hal ini dapat menciptakan adanya interaksi sosial masyarakat (Soekamto, 2016). Dalam konteks bencana komunitas

berfungsi untuk meringankan beban para korban, baik sebagai penghimpun bantuan bencana maupun aksi-aksi sosial lainnya.

2.1.3 Bencana Banjir

Banjir merupakan jenis bencana alam yang paling besar dan menyebabkan kerugian cukup yang besar (Nugroho, 2008). Kerugian berupa materi karena rusaknya barang-barang yang terendam air maupun rusaknya akses jalan begitupun korban jiwa yang disebabkan bencana banjir. Besarnya kerugian yang disebabkan oleh banjir menjadikan perhatian utama pemerintah dalam pembangunan, meskipun sampai saat ini di Jakarta sendiri belum terhindar dari ancaman banjir. Penyebab dari banjir beraneka ragam. Menurut Danapriatna (2009), terjadinya bencana banjir disebabkan oleh banyak faktor, yang dapat dikategorikan menjadi tiga sumber utama, yaitu:

1. Peristiwa alam (dinamis), fenomena alam terjadi karena adanya perubahan alam baik proses penyeimbangan alam dengan lingkungan sekitar maupun fenomena alam yang terjadi dengan sendirinya.
2. Kondisi fisik (statis), pembangunan DAS harus sesuai dengan kapasitas curah hujan serta tingkat kemiringannya yang mempengaruhi kecepatan aliran sungai menjadi penting dalam memicu bencana banjir
3. Kegiatan manusia (dinamis), kegiatan manusia berupa eksplorasi sumber daya alam maupun eksploitasi sumber daya alam terkadang kurang memperhatikan lingkungan alam itu sendiri. Contohnya saja pembangunan permukiman di bantaran sungai maupun buang sampah sembarangan sehingga terjadi penyempitan aliran sungai sehingga dapat berdampak bencana banjir.

Bencana banjir bukan merupakan hal yang asing, terutama bagi masyarakat Jakarta. Ketiga kategori penyebab bencana banjir sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang maupun peraturan daerah sebagai pencegahan bencana banjir. Namun, prinsip-prinsip implementasi dari undang-undang tersebut masih belum terlaksana secara optimal. Hal ini dapat dilihat dengan maraknya berdirinya bangunan liar yang berada di bantaran sungai.

Konsep dalam pengelolaan air di Jakarta pada awalnya adalah bagaimana mengalirkan air ke saluran penghubung yang kemudian di alirkan langsung ke sungai dan bermuara ke laut baik hasil dari produksi rumah tangga maupun air hujan. Bukan bagaimana menampung air sebanyak banyaknya baik di permukaan maupun di dalam tanah. Hal ini diperparah oleh kurangnya kesadaran masyarakat yang membuang sampah sembarangan sehingga dapat menutupi saluran penghubung serta sungai. Tingginya sedimentasi sungai turut serta mempengaruhi kapasitas sungai sehingga ketika kuantitas air besar maka terjadi luapan dan memperparah keadaan banjir di Jakarta

Dalam penanggulangan banjir Jakarta masih menggunakan konsep H van Breen yang di gagas pada tahun 1923 sebagai acuan dalam prinsip dasar pengendalian banjir yang cenderung mengedepankan sistem polder (Gunawan, 2010) kemudian dikombinasikan dengan waduk dan pompa hal ini masih berlaku sampai saat ini seperti yang digambarkan di bawah ini.



Gambar 2.1 Prinsip dasar pengendalian banjir

Sumber: Laporan DKI Jakarta tahun 2015

Berdasarkan prinsip ini air yang berasal dari luar kota Jakarta yang merupakan dataran yang lebih tinggi alirannya dapat diarahkan ke kanal, baik Banjir Kanal Timur maupun Banjir Kanal Barat yang berada di sepanjang pinggir kota Jakarta. Hal ini dilakukan agar air yang masuk ke Jakarta dapat dikendalikan.

Penanganan banjir pun telah lama menjadi fokus utama yang diupayakan oleh pemerintah karena menyebabkan terganggunya pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut dibuktikan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 29 Tahun 1965, 11 Februari 1965 dibentuk "Komando Proyek Pencegahan Banjir DKI Jakarta", disingkat "Kopro Banjir", sebagai badan yang khusus menangani masalah banjir di Jakarta. Hasil kerja dari Kopro Banjir antara lain: (a) Pembangunan Waduk Setia Budi, Waduk Pluit, Waduk Tomang, Waduk Grogol. Bersamaan dengan itu juga dilakukan rehabilitasi terhadap sungai-sungai di sekitarnya; (b) Pembangunan Polder Melati, Polder Pluit, Polder Grogol, Polder Setia Budi Barat, dan Polder Setia Budi Timur; (c) Pembuatan sodetan Kali Grogol, Kali Pesanggrahan, dan Gorong-gorong Jl. Sudirman.

2.1.4 Bencana Dalam Keamanan Nasional

Banyak kajian yang membahas tentang kerjasama dan keterlibatan militer dalam hal penanganan bencana. Operasi Militer Selain Perang (OMSP) merupakan bentuk nyata dari kerjasama sipil dan militer. Laporan PBB tahun 1994 memunculkan konsep *human security* yang menitikberatkan kepada keamanan masyarakat (Susetyo, 2008).

Dasar koordinasi antara sipil dan militer dalam bencana adalah saling berbagi informasi dalam keadaan darurat, baik pihak sipil maupun militer harus saling menginformasikan mengenai rencana dan langkah yang akan mereka tempuh. Apabila ada informasi telah dibagi dan

pembagian tugas telah dilakukan maka pelaksanaan koordinasi sipil militer di lapangan dapat berlangsung secara sinergis (Susetyo, 2008).

Menurut PBB No. 46/182, bantuan kemanusiaan harus diberikan atas dasar kemanusiaan, netralitas, dan tidak berpihak. Selain itu, Panduan Penggunaan Aset Militer dan Pertahanan Sipil dalam Bantuan Bencana. Konsep kerjasama sipil-militer mengacu kepada kesepakatan yang telah diatur secara internasional. CIMIC atau *Civil Military Cooperation* adalah fungsi militer melalui seorang komandan yang berhubungan dengan instansi-instansi sipil yang aktif dalam operasi darurat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai gerakan sosial telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini tentunya memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu, namun terdapat kekhasan yang membedakan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Tabel 2.3 Perbandingan Penelitian Terdahulu

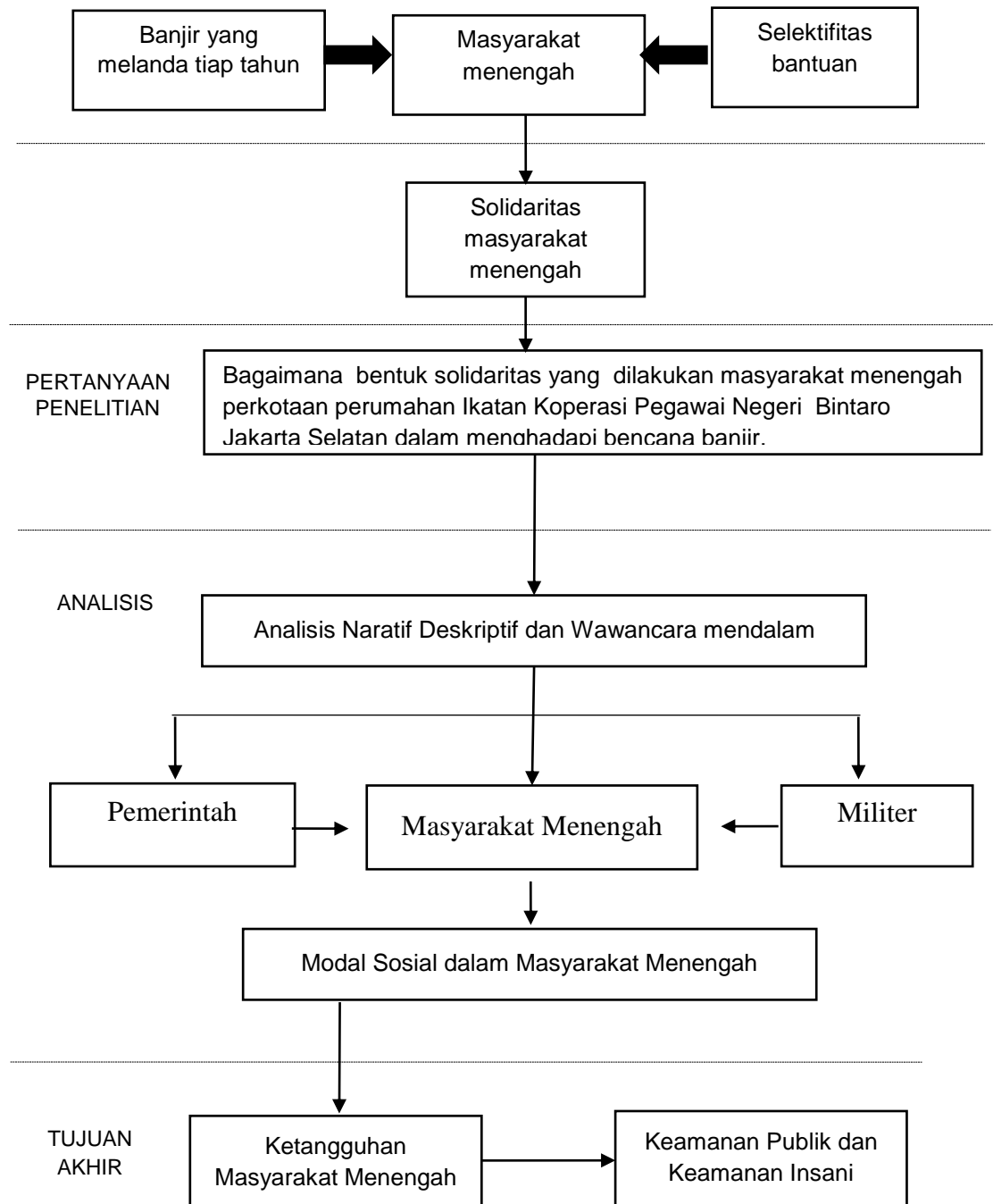
No	Nama	Judul Penelitian	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Disertasi Zulkarnaen Nasution	<i>Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi dalam Pembangunan (Studi Masyarakat Desa Transisi Warga Dusun dan Warga Perumahan di Desa Saptorenggo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang).</i>	kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil masyarakat desa transisi bahwa karakteristik individu, seperti usia akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya hubungan sosial, 2. Ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara karakteristik individu (tingkat pendidikan) dengan solidaritas sosial, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin menurun solidaritas 3. Ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara karakteristik individu (jenis pekerjaan) artinya semakin tinggi prestise kerja, semakin rendah solidaritas 4. Ada hubungan negatif yang sangat signifikan 	Melakukan kajian solidariitas masyarakat	Lokasi yang berbeda

- antara karakteristik individu (tingkat pendapatan) artinya semakin tinggi tingkat pendapatannya maka semakin rendah solidaritas sosialnya
5. Ada hubungan yang sangat signifikan antara karakteristik individu (lama tinggal) dengan solidaritas, artinya semakin tinggi tingkat sosial tetapi semakin baru menetap semakin rendah solidaritas sosialnya.
 6. Ada hubungan yang sangat signifikan antara karakteristik individu (asal daerah) dengan solidaritas sosial artinya semakin jauh asal daerah dengan tempat tinggal, semakin rendah solidaritas sosialnya
 7. Ada hubungan yang sangat signifikan antara karakteristik sosial

2.	M. Baiquni	Modal sosial dalam manajemen bencana banjir rob di Kabupaten Demak	Campuran	<p>(perilaku komunikasi) artinya semakin selalu berkomunikasi maka semakin tinggi solidaritas sosialnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat tidak dapat bekerja satu sama lain sebagai satu kesatuan di desa tersebut. 2. Keadaan kelompok mangrovedi setiap dusun membawa efek negatif seperti perpecahan didalam masyarakat. 3. Peranan modal sosial <i>bonding</i> di masyarakat terkait dengan perlindungan daerah pesisir akan berkurang jika faktor itegrasi masyarakat berkurang 	Melakuka kajjian modal sosial	Lokasi yang berbeda Jenis penelitian berbeda
----	------------	--	----------	---	-------------------------------	---

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian, serta teori dan konsep yang ada, kerangka pemikiran dari penelitian dapat digambarkan dalam skema berikut ini:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber: Peneliti (2016)

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah kualitatif pendekatan naratif, yaitu penelitian tentang kemanusiaan yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Pendekatan kualitatif digunakan berdasarkan untuk mengeksplorasi dan untuk mengetahui fenomena sosial dari sejumlah orang/sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial.

Penelitian kualitatif naratif merupakan strategi rancangan penelitian tentang kemanusiaan, yang mana peneliti mempelajari kehidupan individu maupun kelompok untuk menceritakan kehidupan mereka sebagai informasi yang kemudian dituturkan kembali oleh peneliti dengan menggunakan narasi kronologis (Creswell, 2016). Informasi yang diperoleh dari partisipan berdasarkan pengalaman merupakan informasi berdasarkan pandangan dari setiap partisipan. Untuk itu, perlu adanya penggabungan pandangan dengan gaya naratif oleh pandangan peneliti sendiri.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: (1) Wawancara; (2) Observasi; dan (3) Dokumentasi. Teknik wawancara dipilih dengan mengidentifikasi partisipan yang sengaja dipilih oleh peneliti karena dianggap mampu menjadi *key informan* dalam memahami masalah yang diteliti. Begitu juga dengan observasi yang pada umumnya bersifat *open ended*, yang mana peneliti dapat mengajukan pertanyaan umum terhadap partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan-pandangan mereka (Creswell, 2016). Peneliti menganggap penting adanya observasi dengan turun langsung ke lapangan, guna melakukan pengamatan perilaku dan aktivitas di lokasi penelitian. Peneliti juga mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan banjir maupun dengan Perumahan IKPN Bintaro guna memperkuat dalam

penelitian. Data yang terkumpul melalui ketiga teknik tersebut diolah melalui klasifikasi data dan seleksi data. Mengolah dan mempersiapkan data yang kemudian dilakukan klasifikasi data dan seleksi data, data dianalisis dengan dua tahap, pertama analisis data yang didapatkan selama penelitian di lapangan dan kedua analisis data setelah semua data secara keseluruhan terkumpul.

3.2 Sumber Data, Subjek dan Objek Penelitian

3.2.1 Sumber Data Penelitian

Daftar data yang diperlukan dalam penelitian ini beserta sumber dan fungsi diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Daftar Sumber Data Penelitian

SASARAN	PENGGUNAAN DATA	JENIS DATA	TEKNIK PENGUMPULAN DATA	SUMBER
Peran Solidaritas masyarakat Menengah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Data Kejadian Bencana ➤ Data sosial masyarakat ➤ Data fisik lingkungan ➤ Foto lapangan 	Sekunder dan Primer	Studi Dokumen Observasi, dan Wawancara	BPBD, Kelurahan dan Kecamatan, Kodim

Sumber: Hasil analisis pribadi, 2016

3.2.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Dalam proses pengumpulan data informasi yang dibutuhkan harus mendapatkan data yang tepat maka perlu ditentukan partisipan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan data yang telah ditetapkan (*purposive*). Penelitian ini menggunakan subjek penelitian sebagai berikut.

Tabel 3.2 Subjek, Instansi, dan Informasi yang dibutuhkan

NO	SUBJEK	INSTANSI	INFORMASI YANG DIBUTUHKAN
1.	Kepala	BPBD	Informasi kebencanaan, peran BPBD dalam koordinasi dan sinergi dengan instansi lain terkait dengan perumusan kebijakan mengenai pengurangan risiko bencana
2.	Kepala	Kelurahan	Data dan informasi peta terdampak dan jumlah penduduk terdampak
3.	Kepala	Kodim	Data dan informasi tentang bentuk penanggulangan bencana
4.	Masyarakat	Tokoh Masyarakat, dan Pemuda Karang Taruna	Data dan Informasi mengenai kemampuan masyarakat dan upaya yang dilakukan

Sumber: Hasil analisis pribadi, 2016

3.2.3 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang melekat dan dipermasalahkan. Objek dalam penelitian ini adalah solidaritas masyarakat menengah di Perumahan IKPN dalam menghadapi Banjir.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada partisipan, dan jawaban-jawaban partisipan dicatat atau direkam dengan alat. Dalam proses wawancara biasanya dilakukan secara langsung/tatap muka juga dapat menggunakan telepon maupun wawancara dalam bentuk kelompok (Creswell, 2016). Wawancara dilakukan secara

langsung memiliki kelebihan. Selain untuk mendapatkan informasi historis dari partisipan selama proses penelitian, peneliti juga dapat mengendalikan alur pertanyaan untuk mendapatkan data-data mengenai penelitian ini. Teknik ini digunakan untuk menggali data tentang peran serta masyarakat.

3.3.2 Observasi

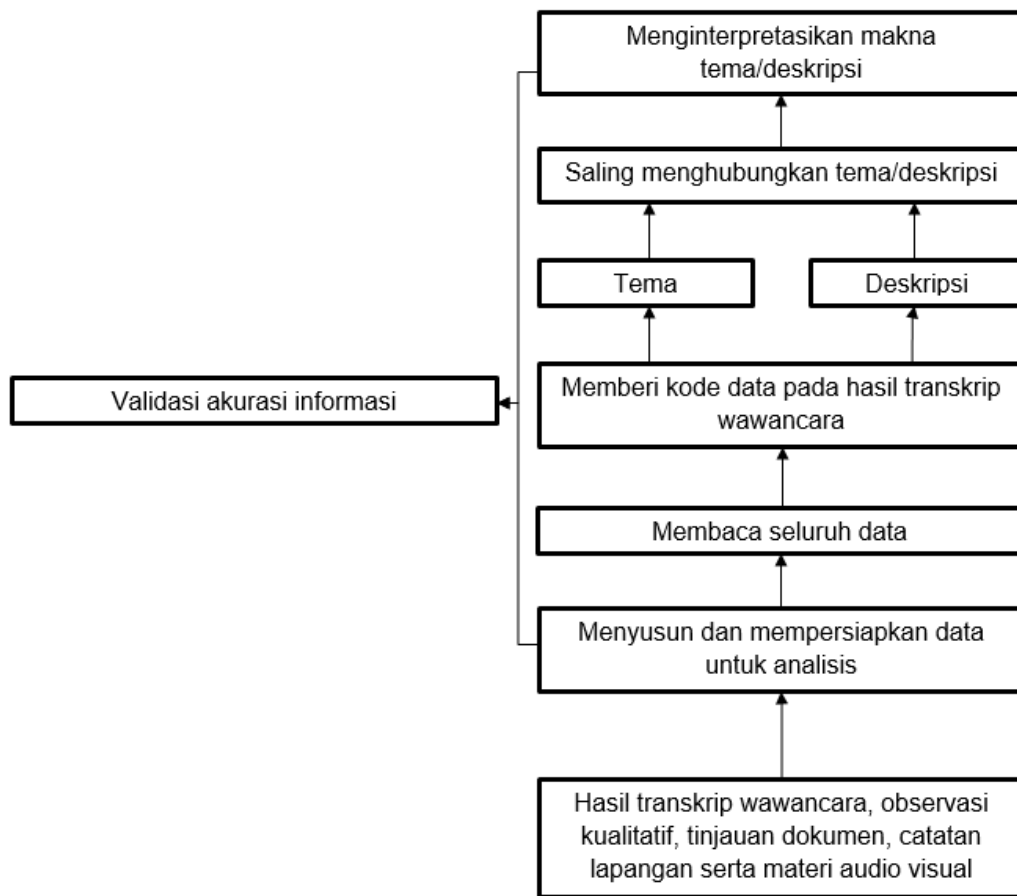
Metode observasi atau pengamatan berarti secara langsung untuk terjun kelapangan dan mengamati perilaku dan aktifitas masyarakat. Dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan pandangan mereka (Creswell, 2016). Teknik ini digunakan untuk mengamati secara langsung dampak terhadap bencana sehingga dapat mengetahui apabila ada kejanggalan atau keanehan selama obeservasi, observasi juga memungkinkan dalam menggali topik-topik yang mungkin kurang menyenangkan partisipan untuk dibahas. Hasil observasi akan dipergunakan data pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.2.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data berupa analisis dokumen yang terkait dengan subjek penelitian baik dokumen tersebut dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Herdiansyah, 2012) pengumpulan data berupa dokumentasi dapat dijadikan bukti tertulis sehingga lebih efektif. Dokumentasi memungkinkan peneliti memperoleh bahasa dan kata kata kontekstual sehingga cukup membantu dalam penelitian (Creswell, 2016). Dokumentasi digunakan untuk mengetahui bantuan yang diberikan oleh masyarakat__maupun dampak yang disebabkan banjir [dalam hal ini dokumentasi yang dikumpulkan berupa foto kegiatan gotong royong masyarakat](#) dan berkaitan dengan banjir IKPN.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses yang berkelanjutan selama penelitian (Creswell, 2016). proses tersebut digunakan untuk menguraikan informasi atau data yang diperoleh selama penelitian yang kemudian di olah sedemikian rupa agar data tersebut dapat dipahami baik oleh peneliti maupun orang lain yang ingin mengetahui hasil penelitian tersebut. Dalam proses penelitian kualitatif pada umumnya meliputi: pengolahan data, penyiapan data, pembacaan awal informasi, peng codingan, deskripsi detail kode, analisis tematik kode, penggunaan program komputer, penyajian data dalam bentuk tabel, grafik dan gambar serta interpretasi data yang kemudian data dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari tujuan penelitian.



Gambar 3.1 Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif

Sumber: Creswell (2016), telah diolah peneliti

Gambar 3.1 menunjukkan bagaimana alur analisis data dalam penelitian kualitatif yang diadaptasi dari Creswell (2016). Analisis data dilakukan dengan mencatat data yang telah diperoleh, kemudian diberi kode agar data tersebut dapat ditelusuri. Setelah bagian pertama selesai, dilanjutkan dengan pemilihan dan pengkategorian. Agar proses pengkategorian memiliki makna, perlu mencari dan menemukan pola-pola serta hubungan-hubungan sehingga didapat temuan-temuan umum (Moeloeng, 2009). Langkah analisis data dilakukan agar memperoleh hasil penelitian yang diharapkan. Berikut adalah langkah-langkah analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini:

- 1) Mengolah dan mempersiapkan data yang diperoleh di lapangan (wawancara, observasi, dokumen, materi audio visual) menjadi transkrip yang kemudian dipilah untuk dianalisis lebih lanjut.

- 2) Membaca keseluruhan data dan membangun pemikiran umum atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
- 3) Memulai *coding* semua data analisis. Menurut Rossman dan Rallis (dalam Cresswell, 2016), *coding* adalah proses mengorganisasikan data dengan mengumpulkan bagian teks atau gambar dan menuliskan kategori dalam batas-batas. Penelitian ini mengombinasikan dua jenis kode yaitu (1) kode yang muncul dengan sendirinya (*emerging code*) dan (2) kode yang telah ditentukan (*predetermined code*). *Emerging code* diterapkan untuk mengantisipasi apabila terdapat kategori yang tidak disangka-sangka untuk muncul, sedangkan *predetermined code* diterapkan dengan menggunakan teori yang telah ada sebelumnya.
- 4) Menerapkan proses *coding* untuk menjelaskan *setting*, partisipan, kategori dan tema yang dianalisis. Deskripsi yang dimaksud adalah penyampaian usaha secara detail tentang subjek dan objek penelitian demi menjawab pertanyaan penelitian. Deskripsi informasi tersebut kemudian melalui proses *coding* sehingga diperoleh sejumlah kecil tema atau kategori, lima hingga tujuh kategori (Cresswell, 2016). Tema-tema inilah yang menjadi temuan hasil dalam penelitian kualitatif dan peneliti juga bisa membuat analisis yang lebih kompleks dengan mengaitkan tema dalam suatu rangkaian cerita (naratif).
- 5) Deskripsi dan tema-tema yang telah ditemukan tersebut kemudian disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif. Pendekatan naratif adalah pendekatan yang paling populer dimana peneliti membahas tentang kronologi peristiwa, tema tertentu (lengkap beserta beberapa subtema, ilustrasi khusus, perspektif, dan kutipan), atau tentang keterkaitan tema (Cresswell, 2016).
- 6) Membuat interpretasi dalam penelitian kualitatif atau memaknai data. Interpretasi dapat berupa perbandingan hasil penelitian

dengan informasi yang berasal dari literatur/teori dengan tujuan untuk membenarkan atau menyangkal informasi sebelumnya.

Keenam langkah analisis data inilah yang akan diterapkan dalam penelitian untuk menjawab ketiga pertanyaan penelitian yang telah diajukan di awal. Kemudian di bawah ini adalah *predetermined codes* yang akan digunakan dalam proses *coding* nantinya. Perlu diperhatikan bahwa kode-kode yang ditentukan dalam menjawab setiap rumusan pertanyaan ini dapat berinteraksi satu sama lain sesuai dengan hasil di lapangan nantinya. Kode-kode ini pun nantinya dapat bertambah seiring dengan kemunculan kode baru (*emerging codes*) di lapangan.

Validasi data penelitian kualitatif memiliki konotasi yang berbeda dengan validasi dalam penelitian kuantitatif. Validasi kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu, yaitu Dengan deskriptif yang kaya dan padat tentang hasil penelitian (Creswell, 2016). Deskriptif ini setidaknya harus menggambarkan ranah penelitian dengan membahas salah satu elemen dari pengalaman pengalaman partisipan.

3.5 Prosedur Penelitian

3.5.1 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini menggunakan panduan wawancara *Sustainable Livelihood Framework*, sebuah pendekatan yang dikemukakan Twigg yang berupaya menjelaskan tentang sosial capital suatu individu atau masyarakat dalam menghadapi suatu bencana.

Tabel 3.3 Instrumen Penelitian John Twigg *Sustainable Livelihood Framework*.

HUMAN CAPITAL	SOSIAL CAPITAL	NATURAL CAPITAL	PHYSICAL CAPITAL	FINANCIAL CAPITAL
1. Pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana banjir. 2. Kepedulian terhadap lingkungan. 3. Inisiatif menjaga lingkungan sekitar sungai. 4. Pemahaman tentang peringatan dini. 5. Tingkat pendidikan warga. 6. Keterampilan warga dalam menghadapi bencana banjir. 7. Perbedaan Perspektif tentang banjir	1. Sikap atau perilaku masyarakat kota terhadap bantaran sungai. 2. Kesiapsiagaan warga. 3. Pola struktur organisasi formal. 4. Pola struktur organisasi informal. 5. Kepadatan penduduk warga. 6. Kebijakan pemerintah tentang penanggulangan bencana. 7. Pola hubungan antar warga. 8. Pola	1. Curah hujan. 2. Kedalaman sungai. 3. Tanaman penyangga dibantaran sungai 4. Struktur tanah dipinggiran bantaran sungai. 5. Tata ruang wilayah. 6. Zonasi pergerakan tanah.	1. Sistem peringatan dini 2. Jalur dan rambu evakuasi banjir 3. Jarak pemukiman dengan bantaran sungai 4. Shelter sementara untuk evakuasi sementara saat banjir. 5. Peralatan dan fasilitas umum untuk evakuasi saat banjir. 6. Struktur bangunan pemukiman. 7. Struktur jalan untuk jalur evakuasi. 8. Alat peringatan dini kepada warga. 9. Keberadaan tanggul disepanjang bantaran sungai. 10. Peta rawan	1. Aktivitas kerja warga 2. Penggalangan dana swadaya masyarakat saat banjir 3. Strategi ekonomi warga untuk bertahan selama kejadian banjir 4. Bantuan pemerintah. 5. Pola pengelolaan sumberdaya ekonomi warga saat banjir. 6. Pendapatan per kapita 7. Desa tertinggal/ tidak 8. Lumbung makanan 9. Asuransi kebencanaan

<p>berdasarkan gender.</p> <p>8. Cara memaknai kesulitan saat kejadian banjir.</p> <p>9. Bentuk pembelajaran setelah pengalaman kejadian banjir.</p> <p>10. Pola pikir terhadap bencana banjir.</p> <p>11. Kesadaran diri tinggal di daerah rawan bencana banjir.</p>	<p>kepemimpinan dalam komunitas warga.</p> <p>9. Proses komunikasi antar warga dan pemerintah</p> <p>10. Proses komunikasi antar warga.</p> <p>11. Rasio kelompok rentan dalam komunitas.</p> <p>12. Sistem komunikasi penyebaran informasi banjir.</p> <p>13. Jaringan – bonding, bridging, linking</p>		<p>bencana, peta evakuasi</p>	
---	--	--	-------------------------------	--

3.5.2 Data Primer

Data primer didapatkan biasanya ketika proses observasi berlangsung di lapangan. Data tersebut harus berkaitan dengan masalah penelitian guna mendukung dalam proses analisis data. Pada umumnya berkaitan dengan foto lapangan kondisi fisik alam, serta hasil wawancara dengan pihak-pihak dari instansi atau lembaga yang terkait dengan penelitian.

3.5.3 Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang didapatkan melalui media perantara berupa catatan, laporan data, atau dokumentasi yang berasal dari lokasi penelitian guna melengkapi penelitian. Namun bentuk Data tersebut berupa peta, dokumen, artikel, ataupun data lain yang relevan dengan masalah penelitian yang diperoleh melalui instansi yang berwenang dalam pendataan, dan koordinasi seperti BPBD, Kodim, Kelurahan serta masyarakat IKPN Bintaro.

3.5.4 Pengujian Keabsahan dan Keterandalan Data

Triangulasi dilakukan dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data. Yaitu dengan memeriksa bukti- bukti yang didapatkan dengan sumber data informasi dan menggunakannya sebagai membangun justifikasi tema secara koheren (Creswell, 2016). Triangulasi dengan teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Sebelum penelitian terlebih dahulu dilakukan studi dokumen dan literatur, kemudian data diperoleh dengan wawancara, kemudian dilakukan pengecekan kembali dengan observasi dan dokumentasi. Reliabilitas kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini menerapkan prosedur yang dikembangkan oleh Gibbs (*dalam* Cresswell, 2016) sebagai berikut:

- 1) Memeriksa kembali hasil transkripsi agar tidak ada kesalahan selama proses analisis.

- 2) Memastikan tidak ada definisi kode-kode dalam proses *coding* yang mengambang.
- 3) Melakukan *cross-check* kode-kode yang diperoleh secara mandiri dengan teori atau penelitian yang telah ada.

BAB 4

HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

4.1.1 Lokasi Pengumpulan Data

Penelitian ini mengambil lokasi di Perumahan IKPN Bintaro Perumahan IKPN Bintaro berada di Kecamatan Pesanggrahan awalnya masuk ke dalam administrasi kota Tangerang sampai adanya pemekaran wilayah Jakarta sehingga wilayah Bintaro ditarik ke dalam kota administrasi Jakarta selatan. Secara geografis Jakarta Selatan sendiri terletak pada 106°22'42 Bujur Timur (BT) s.d. 106°58'18 BT, dan 5°19'12 Lintang Selatan (LS). Dengan Luas Wilayah sesuai Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1815 tahun 1989 adalah 145,73 km² atau 22,41% dari luas [DKI Jakarta](#).

Perumahan Induk Koperasi Pegawai Negeri dari berbagai instansi pemerintahan salah satunya merupakan pindahan dari para pegawai negeri Sipil Sekolah Tinggi Olahraga (STO). Suhaily mengatakan “bahwa perumahan IKPN merupakan pindahan asrama STO. Karyawan digusur untuk dibangun arama altet di Senayan. Dari STO kalo sekarang namanya IKIP”. Hingga saat ini menjadi Universitas Negeri Jakarta (UNJ). STO sendiri awal mulanya berada di bilangan senayan dikarenakan adanya perhelatan pesta olah raga internasional (Asian Games) IV pada tahun 1962. Persiapan dalam penyambutannya membutuhkan lahan yang cukup besar. Untuk itu, pegawai STO Senayan kemudian direlokasi ke perumahan IKPN Bintaro melalui program bedol desa perumahan para Pegawai Negeri Sipil.

Perumahan IKPN merupakan salah satu hasil dari program kementerian sosial pada tahun 1953-1955 di bawah kepemimpinan Pahlawan Nasional Raden Panji Soeroso yang memperjuangkan agar pegawai negeri dapat membeli rumah dinas dengan cara mencicil. Pendirian koperasi pegawai di setiap kantor mulai dari pusat sampai ke

daerah-daerah. Gerakan koperasi ini terus berkembang dan akhirnya berdirilah Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN).

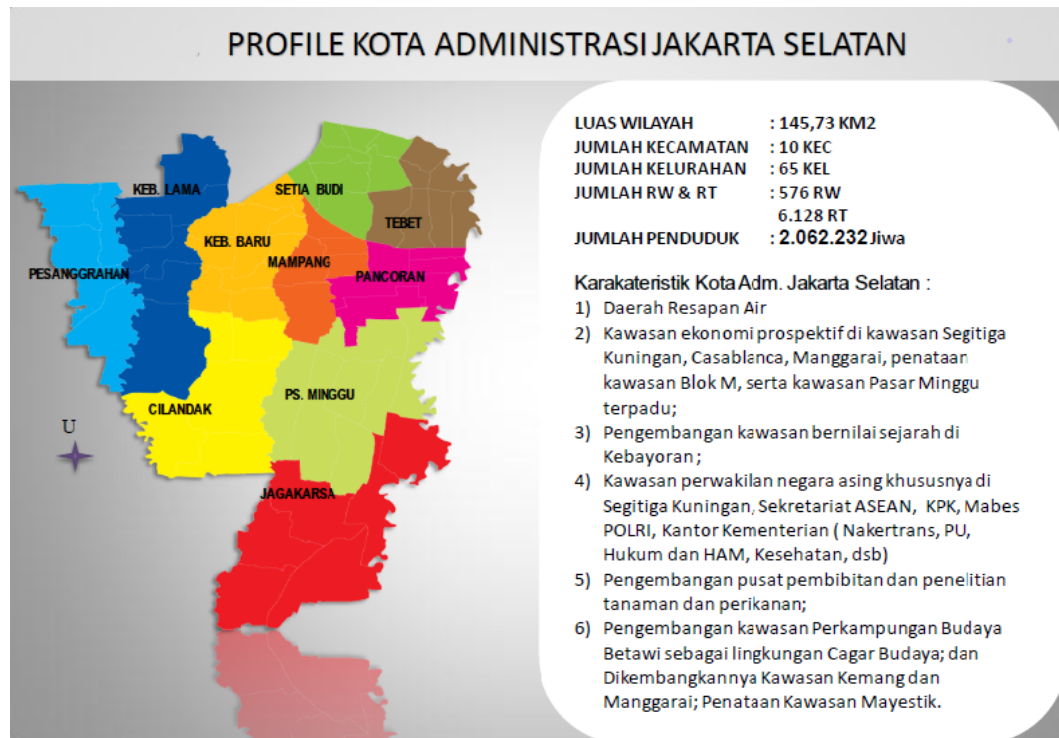
Perumahan IKPN Bintaro memiliki luas sebesar $\pm 4,5$ Hektar dengan jumlah permukiman sebanyak 450 rumah terbagi menjadi 8 blok. Secara geologis perumahan tersebut berbentuk cekungan yang seperti mangkok dan letak dari perumahan IKPN ini menjadi titik terendah dari permukaan sekitar.



Gambar 4.1 Ilustrasi Tanah Perumahan IKPN Berbentuk Cekungan

Sumber: Hasil Olahan Pribadi, 2016

Perumahan IKPN berada di dataran terendah dari wilayah lain hal ini menyebabkan air yang berada di sekitaran perumahan masuk dan tertampung dalam penampungan air milik perumahan IKPN. Apabila air melebihi kapasitas penampungan maka air meluap ke permukiman warga. Menurut Hartono, “Perumahan IKPN ini berbentuk mangkok/cekungan, sedari dulu memang sudah banjir. Namun banjirnya perkembangan waktu, kalo sungai dulu ada di bawah, sedimennya belum tinggi. Kalo dulu sungainya kecil kalo nebrang ajj cukup ngasih 2 kaso jadi”. Perumahan ini berada di dataran rendah dan paling mendekati dengan aliran sungai Pesanggrahan. Sehingga air yang berada di sekitar perumahan pun mengalir melintasi perumahan IKPN.



Gambar 4.2 Profile Kota Jakarta Selatan

Sumber: Laporan DKI Jakarta, 2015

Kota Jakarta selatan sendiri memiliki 10 Kecamatan terdiri dari 65 kelurahan salah satunya adalah Kelurahan Bintaro yang berbatasan langsung dengan wilayah Tangerang Selatan. Kelurahan Bintaro sendiri Berada di wilayah KODIM 0504 Jakarta selatan. Wilayah tersebut di lalui oleh aliran sungai Pesanggrahan dan juga merupakan titik temu dari aliran sungai Grogol yang bermuara ke sungai Cisadane.

4.1.2 Profil Kebencanaan

Banjir Jakarta sudah terjadi sejak lama bahkan sejarah mencatat bahwa banjir Jakarta sudah ada semenjak tahun 1893 yakni masa kolonial Belanda (Gunawan, 2010). Ini membuktikan bahwa Jakarta sebagai dataran rendah mengalami kesulitan dalam penanganannya. selain disebabkan oleh faktor alam, tingginya urbanisasi merupakan salah satu pendorong penyebab terjadinya banjir dengan tingginya peralihan fungsi lahan resapan menjadi pemukiman penduduk serta hasil limbah rumah

tangga yang dihasilkan kemudian dialirkan langsung kesungai berpengaruh terhadap kapasitas daya tampung sungai.

Hartono menuturkan “Sungai dulu itu berada di bawah sedimentasi belum terlalu tinggi dan masih di kelilingi dengan kebun karet sehingga resapan tanah masih bagus. Lebar dari sungai pesangrahan sendiri tidak terlalu besar karena pada masa itu untuk menyebrangi sungai pesangrahan dapat di lakukan dengan membentangkan 2 balok, dan di sekitaran perumahan merupakan persawahan yang di kelilingi tebing2 perkebunan”. Sungai Pesangrahan pada awalnya merupakan sungai irigasi persawahan dengan diameter sungai yang tidak terlalu besar namun cukup dalam, mengingat wilayah tersebut dahulunya merupakan persawahan yang dikelilingi oleh tebing perkebunan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan tingginya perkembangan urbanisasi sungai Pesangrahan kini sudah beralih fungsi sebagai aliran penampungan air hujan, limbah rumah tangga dan serapan air. Semakin sedikitnya tanah serapan yang ada di Jakarta menjadikan sungai sebagai tempat penampungan air hujan dengan kapasitas yang semakin mengecil. Kebutuhan serapan air di Jakarta berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk. Bak efek domino semakin besar pertumbuhan penduduk maka semakin besar pula kebutuhan lahan begitu juga dengan serapannya.

Pelebaran sungai Pesangrahan yang terjadi bukan dalam rangka program penanggulangan banjir baik dari pemerintah maupun oleh masyarakat IKPN. Akan tetapi, pelebaran terjadi dengan sendirinya karena adanya erosi di bibir sungai sehingga hal ini membuat sungai mengalami sedimentasi. Seperti yang dikatakan pak Hartono “sungai tersebut melebar bukan karena pelebaran namun melebar dengan sendirinya karena adanya erosi, posisi tanggul ke bibir sungai pada awalnya maasih ada jarak 5 meter namun sekarang hanya tinggal 1 meter itu membuktikan adanya pengikisan tanah di bibir sungai”. tingginya sedimentasi/pendangkalan sungai berpengaruh terhadap kapasitas daya tampung sungai Pesangrahan yang lambat laun semakin mengecil, oleh karena itu apabila sungai Pesangrahan mengalami curah hujan yang

cukup tinggi menyebabkan air melebihi kapasitas daya tampung sehingga meluap ke permukiman warga di bantaran sungai Pesanggrahan salah satunya perumahan IKPN,

Sungai Pesanggrahan berbeda dengan sungai di Jakarta pada umumnya, karena biasanya sungai terketak berada di titik terendah dari sebuah pemukiman namun keberadaan sungai Pesanggrahan di perumahan IKPN Bintaro lebih tinggi dengan perumahan sehingga membutuhkan tanggul sebagai penahan air. Hingga pada tahun 1996 kementerian PUPR merenovasi tanggul dengan membangun tiang pancang.

Penyebab banjir dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu faktor alam, kondisi fisik, dan ulah manusia. Dan dapat dibedakan berdasarkan jenisnya yaitu banjir lokal, banjir kiriman serta banjir rob. Perumahan IKPN sendiri dapat mengalami banjir lokal dan banjir kiriman. Hartono Menuturkan Banjir IKPN dapat disebabkan oleh: 1. "Debit air dari hulu tinggi dapat menyebabkan banjir 2. Hujan lokal dapat banjir selama durasi 2 jam karena permukaan perumahan yang seperti mangkok 3. Daya kapasitas air yang melebihi tanggul (limpas). Seperti yang terjadi disebabkan tanggul situ gantung yang jebol, kedalaman sampai diatas 1 meter namun tidak lama". Yang dimaksud dengan Banjir lokal karena posisi perumahan merupakan dataran terendah apabila terjadi intensitas hujan yang cukup tinggi dan terdapat kendala terhadap mesin pompa baik di karenakan kerusakan maupun keterlambatan bahan bakar maka dapat dipastikan perumahan tersebut tergenang. Sedangkan banjir kiriman dapat terjadi karena adanya intensitas hujan yang berada di hulu sungai sehingga terdapat peningatan kapasitas air sungai. Meskipun di Perumahan IKPN Bintaro terjadi hujan karena memiliki posisi sungai berada di atas dengan dilapisi tanggul sehingga apabila kapasitas air melebihi daya tampung tanggul dan melebihi batas kemampuan mesin pompa maka menyebabkan mesin tidak dapat dioperasikan. Hal tersebut menjadikan air meluap melalui bibir tanggul dan melintas kepermukiman warga.



Gambar 4.3 Peta rawan bencana PUPR

Sumber: Hasil Olahan Pribadi, 2016

Berdasarkan gambar di atas Kementerian PUPR pada tahun 2002 memasukan perumahan IKPN Bintaro sebagai peta daerah rawan bencana walaupun saat ini masyarakat IKPN sudah tidak lagi masuk ke dalam wilayah rawan banjir karena adanya pengerukan sedimentasi yang dilakukan kementerian PUPR sangat membantu dalam menaikkan kapasitas sungai agar tidak terjadi luapan.

4.1.3 Sistem Pengendalian Banjir Sungai Pesanggrahan

Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) dahulu bernama Komando Proyek (Kopro) banjir merupakan badan yang dibentuk pemerintah dibawah kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pak Robby menjelaskan bahwa “rumah pompa ini kan terbagi (kepengurusanya) ada yang dari dinas dan suku

dinas dan terbagi lagi dari kementrian PUPR dengan sistem koordinasi” BBWSCC memiliki kewenangan dalam konstruski tanggul maupun pembangunan yang berkaitan dengan sungai sungai besar di Jakarta dan terintegrasi. Adapun kepengelolaan pompa air merupakan wewenang dari sudin SDA Jakarta selatan.

Wilayah Kota Jakarta selatan sendiri memiliki Sudin SDA dengan jumlah total satgas sebesar 2042 secara keseluruhan yang terbagi pada setiap wilayah Kecamatan. Satgas tersebut bekerja setiap hari dibawah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) badan air dan lingkungan hidup untuk membersihkan seluran penghubung dan fokus pada penanganan lumpur yang berada disaluran penghubung termasuk penjaringan kebersihan sungai dari sampah. Dan apabila terjadi bencana satgas tersebut diperbantukan untuk menolong warga.

Pada tahun 1996 rumah pompa dibangun oleh Balai Besar wilayah Ciliwung Cisadane (BBWSCC) sebagai tempat pemantauan. perumahan IKPN memiliki 3 buah pompa, 1 pompa bekapasitas 1000 dan 2 diantaranya masing masing berkapasits 250 sehingga dalam proses pengeringan jika di akumulasikan kemampuan 3 buah pompa tersebut adalah $250+250+1000 = 1500$ liter perdetik dengan menghabiskan bahan bakar sebanyak 8 liter per jam.

Rumah pompa perumahan IKPN terdapat lima orang petugas yang terdiri dari penanggung jawab dan empat lainnya sebagai penjaga pompa secara bergantian. Para petugas di rumah pompa tersebut sudah diberikan beberapa pelatihan yang dilaksanakan oleh sudin SDA terkait pengoprasian mesin pompa dan harus mendapatkan sertifikasi dalam pengoperasiannya. Adapun lama dan bentuk pelatihan tersebut, bergantung kepada kebutuhan tujuan yang ingin tercapai.

Adapun operasional mesin biasanya tergantung besar kecilnya kapasitas air yang berada di dalam penampungan air (kolakan) dengan panjang 10 meter, lebar 3 meter dan memiliki kedalaman 4 meter. Air yang tertampung didalam kolakan tersebut berasal dari air hujan

ataupun limbah rumah tangga, sehingga setiap harinya harus dilakukan pengosongan tempat penampungan.

Pengosongan kolakan membutuhkan waktu 1 jam untuk sekali pengosongan dan dilakukan 3 kali sehari. Apabila cuacanya sedang mendung sebagai langkah antisipasi maka kolakan wajib di kosongkan karena kapasitas kolakan yang tidak terlalu besar. Dalam pengosongan kolakan salah satu yang menjadi Kendala adalah banyaknya sampah yang berada di saluran air dan penampungan walaupun sudah setiap hari di angkat oleh PPSU namun kesadaran masyarakat perlu lebih dibangun kembali dengan kebiasaan untuk hidup lebih sehat.

4.1.4 Gambaran Umum Partisipan Penelitian

Partisipan dalam penelitian ini secara umum dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang, yaitu sudut pandang Pemerintah dan Masyarakat. Sesuai dengan tema yang dikaji dalam penelitian ini yaitu solidaritas masyarakat menengah perumahan IKPN Bintaro sehingga pembahasan yang dilakukan menitikberatkan pada perspektif masyarakat terhadap bencana banjir. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang peran serta Pemerintah Daerah sebagai stakeholder pengambil kebijakan dalam penanggulangan bencana.

Tabel 4.1 Partisipan Penelitian

NO.	PARTISIPAN	JABATAN	KETERANGAN
1.	Bapak Dankeu	Ketua RW 05	Tokoh Masyarakat
2.	Bapak Yudhi	Ketua RT 01	Tokoh Masyarakat
3.	Bapak Suhaily	Ketua RT 04	Tokoh Masyarakat
4.	Bapak Rusdaya	Ketua RT 03	Tokoh Masyarakat
5.	Bapak Hartono	Pemelihara rumah Pompa, sekaligus warga sejak tahun 62	Tokoh Masyarakat
6.	Bapak Narso	Petugas sudin tata air sebagai penjaga Pompa	Petugas pompa
7.	Bapak Jamaludin Rahim	Kasi. Pemerintahan Kelurahan Bintaro.	Kelurahan
8.	Ibu Ely	Kasi. Kesbang Kelurahan Bintaro	Kelurahan
9.	Bapak Muhidin	PPSU Kelurahan Bintaro	Kelurahan
10.	Adi Setyo .P	Staff Pemberdayaan Masyarakat dan Kedaruratan BPBD DKI	BPBD DKI
11.	Embay S	Kasi. Kesiapsiagaan	BPBD DKI
12.	Bapak Ntus		BPBD DKI
13.	Robby dwi Mariansyah	Staf seksi pemeliharaan sistem pengendali banjir air baku air bersih dan air limbah kota administrasi Jakarta selatan	Sudin Sumber Daya Air
14.	May. Inf Sunarko SH MM	Kasdim 0504 Jakarta Selatan	Kodim 0504
Total			14

4.2 Analisis Data dan Interpretasi Hasil

4.2.1 Bentuk Solidaritas Masyarakat Menengah Dalam Menghadapi Bencana Banjir

Solidaritas dapat terbangun berdasarkan perasaan simpati masyarakat terhadap masyarakat lainnya. Masyarakat perumahan IKPN membentuk paguyuban berdasarkan adanya kesadaran sosial masyarakat IKPN yang hidup dalam satu lingkungan. Sehingga paguyuban tersebut dapat menjadi wadah interaksi masyarakat IKPN dalam menyelesaikan permasalahan pengurangan risiko bencana maupun penangulangannya.

Paguyuban IKPN sudah ada semenjak awal berdirinya perumahan tersebut. Pengurus paguyuban tersebut merupakan masyarakat perumahan IKPN yang memiliki kepedulian terhadap banjir meskipun tidak memiliki tugas yang signifikan. Sehingga hanya sekedar bersifat momentum dalam rangka upaya pengendalian dan pengurangan risiko bencana banjir.

Paguyuban juga merupakan wadah interaksi sosial masyarakat dalam bermusyawarah maupun mengambil tindakan yang diperlukan untuk kemaslahatan bersama. keberadaan paguyuban dikhususkan bagi masyarakat perumahan IKPN untuk membangun emosional terhadap masyarakat lain sebagai upaya agar perumahan IKPN tidak lagi menjadi wilayah terdampak banjir.

4.2.2 Bentuk Solidaritas Masyarakat Dan Partisipasi Masyarakat

Masyarakat IKPN memiliki sistem sosial dalam bentuk gotong royong yang diakomodir oleh paguyuban dengan melaksanakan berbagai macam program. Program yang dilaksanakan oleh masyarakat IKPN bukan hanya berbentuk (1) kerjabakti yang rutin dilakukan dalam upaya realisasi program bersih bersih Jakarta selatan oleh pemerintah daerah. Gotong royong dilakukan dalam upaya penanggulangan banjir dan sosial bermasyarakat.

Sebagai bentuk gotong royong pembangunan tanggul awal sungai Pesanggrahan yang berada di sepanjang perumahan IKPN merupakan

hasil dari swadaya masyarakat IKPN. Bantuan tersebut baik berbentuk tenaga maupun berbentuk dana yang dikolektif untuk pembelian material bangunan. (2) Pembangunan tanggul sementara dengan ketinggian 1 meter merupakan hasil dari inisiatif masyarakat IKPN sebagai upaya pengurangan risiko bencana.

Paguyuban IKPN juga berfungsi sebagai wadah interaksi sosial masyarakat dengan (3) melakukan peminjaman pompa air perumahan IKPN hasil dari koordinasi antara paguyuban dengan KOPRO banjir. Pengadaan mesin pompa perumahan IKPN awalnya dipercaya untuk mengelola satu mesin pompa. Sampai akhirnya diberikan penambahan 2 buah mesin berkapasitas kecil karena mesin yang dimiliki pada saat itu dianggap kurang mampu untuk mengimbangi kapasitas air.

Paguyuban IKPN juga melakukan (4) kolektifitas donasi dari masyarakat untuk ketersediaan bahan bakar mesin pompa air maupun kesejahteraan para petugas pompa saat itu. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari partisipasi masyarakat. Sampai tahun 2002 tanggung jawab tersebut diambil alih oleh pemerintah daerah melalui Sudin SDA. Namun saat ini paguyuban bersifat persiapan antisipasi apabila dalam pendistribusian bahan bakar mengalami keterlambatan.

Bentuk gotong royong paguyuban perumahan IKPN adanya (5) partisipasi dalam membantu warga perumahan yang tertimpa kesulitan, sedang sakit ataupun meninggal dunia. Dengan mengkolektif bantuan swadaya masyarakat paguyuban tersebut mencoba untuk mengurangi beban masyarakatnya. Selain itu paguyuban juga mengkoordinasikan kesejahteraan para petugas keamanan dan petugas kebersihan perumahan yang berjumlah 6 orang keamanan, 2 orang petugas kebersihan.

4.2.3 Perbedaan Solidaritas Masyarakat Menengah Dengan Masyarakat Desa

Masyarakat IKPN merupakan masyarakat pendatang yang berasal dari berbagai latarbelakang suku dan budaya yang berbeda oleh karena itu masyarakat IKPN dapat dikatakan sebagai masyarakat heterogen. Perbedaan heterogen dalam suatu budaya masyarakat dapat mempengaruhi perilaku sosial. Berbeda dengan masyarakat sekitar yang lebih homogen sebagai penduduk asli dalam suatu daerah yang sudah lama menetap secara turun temurun, sehingga biasanya memiliki keterikatan pada norma dan nilai sosial yang tinggi.

Letak perumahan IKPN yang berada di ibukota menjadikan masyarakat IKPN memiliki fasilitas yang lengkap dan cenderung disibukkan dengan padatnya waktu untuk bekerja. Hal ini membuat masyarakat perkotaan umumnya tidak tidak bergantung kepada orang lain. Hal ini berbeda dengan masyarakat pedesaan yang biasanya memiliki keterbatasan dalam fasilitas sehingga membutuhkan kerjasama dan tolong menolong dalam menyelesaikan suatu masalah.

Tingkat kepercayaan masyarakat yang heterogen lebih kecil dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki kesamaan yang jauh lebih banyak. Bangunan emosional terjadi dalam suatu rasa sepeasaan sehingga lebih menanamkan pada kerja kelompok. Masyarakat perkotaan memiliki kecenderungan sikap individual dalam menyelesaikan permasalahan secara mandiri berbeda dengan masyarakat pedesaan yang lebih mengedepankan kerja sama.

Dalam struktur sosial masyarakat, perumahan IKPN di khususkan untuk para pegawai negeri. Perumahan IKPN terletak di pinggir Ibukota sehingga menjangkau harga bagi para pegawai negeri yang memiliki penghasilan yang cukup. Tingginya kebutuhan hidup di ibukota menuntut masyarakat yang tinggal di dalamnya memiliki penghasilan yang cukup besar sehingga untuk dapat tinggal di perumahan tertata membutuhkan kapasitas keuangan yang baik.

Ciri masyarakat perkotaan adalah kesadaran dalam bernegara dan mematuhi sebuah norma aturan yang berlaku. Aturan tersebut biasanya tertulis dalam undang-undang maupun peraturan daerah yang berlaku. Hal ini merupakan kontrol sosial dalam mengatur masyarakat. Berbeda dengan masyarakat pedesaan yang lebih mengedepankan aturan adat yang di lindungi berdasarkan tokoh adat sebagai pedomannya.

Pada umumnya masyarakat perumahan di Jakarta merupakan masyarakat modern dengan bertempat tinggal di perumahan tertata membuat masyarakat perumahan memiliki tingkat individualis yang tinggi maka sulit untuk menemukan rasa solidaritas. Hal ini disebabkan karena kondisi daerah yang lebih maju dan modern sehingga mudah untuk mendapatkan suatu hal yang diharapkan dan diinginkan.

Tabel 4.2 Solidaritas Mekanik dan Organik

CIRI	SIKAP	SOLIDARITAS MEKANIK	SIKAP	SOLIDARITAS ORGANIK
Aktifias sosial utama	(-)	-homogen	(+)	-heterogen
	(-)	-konesus moral dan agama	(+)	-Konesus pada nilai nilai abstral
	(+)	-saling ketergantungan rendah	(-)	-saling ketergantungan tinggi
	(-)	Bersifat primitif atau pedesaan	(+)	-bersifat industrial-perkotaan
Posisi individu	(+)	-kolektivisme, komunitas	(-)	-individualisme
	(+)	-menanamkan pada kelompok	(-)	-menekankan otonomi individu
Struktur ekonomi	(-)	-kelompok terisolasi		-terbuka terhadap inovasi
	(-)	-pembagian kerja rendah	(+)	-pembagian kerja tinggi

Kontrol sosial	(+)	-mencukupi kebutuhan	(+)	-pertukaran antar kelompok
	(-)	-keterlibatan komunikasi dalam menghukum	(-)	-badan badan kontrol sosial yang menghukum orang yang menyimpang
			(+)	

Sumber: diolah oleh Peneliti (2016)

Sumber: diolah oleh Peneliti (2016)

Masyarakat IKPN merupakan masyarakat menengah yang memiliki ciri diantara masyarakat modern dengan masyarakat pedesaan secara tidak utuh. Masyarakat IKPN dengan memiliki ciri aktifitas sosial utama, stuktur ekonomi dan kontrol sosial sebagai masyarakat perkotaan namun pada posisi individu masyarakat IKPN merupakan ciri masyarakat pedesaan.

4.2.4 Solidaritas Sebagai Modal Sosial

Terbangunnya interaksi masyarakat untuk membuat paguyuban dimanfaatkan dalam membangun solidaritas masyarakat IKPN. Sebagai hubungan norma satu tempat tinggal sebagai daerah terdampak. emosional masyarakat IKPN yang tumbuh berguna untuk mencapai tujuan dan kepentingan yang sama dengan memanfaatkan sumber daya masyarakat dan ikatan emosional yang baik menjadi modal sosial dalam manajemen bencana.

Dalam master plan program normalisasi sungai Pesanggrahan BWSCC, sebagian perumahan IKPN masuk wilayah yang perlu direlokasi dalam upaya pelebaran bantaran sungai, sehingga membutuhkan lebar 5 meter dari bibir sungai yang perlu dipindahkan ketempat lain. Bagi masyarakat yang berada di bantaran sungai secara otomatis terkena relokasi. Melalui paguyuban IKPN dalam tim pembebasan banjir mencoba untuk memperjuangkan nasib para warga agar tidak perlu direlokasi

sehingga paguyuban menyapaikan kepada pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik.

Status tanah perumahan IKPN merupakan milik pribadi yang berarti mayoritas masyarakat IKPN sudah memiliki sertifikat tanah hak milik (SHM). Dalam upaya relokasi masyarakat IKPN berhak untuk menolak relokasi, sedangkan sisi seberang sungai merupakan tanah milik bank Expor Impor Indonesia (Exim) yang merupakan bank dibidang pembiayaan perdagangan negara atau yang sekarang lebih di kenal dengan bank Mandiri. Sehingga masyarakat yang bertempat tinggal ditanah tersebut merupakan masyarakat dengan status tanah garapan sehingga masyarakat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam mempertahankannya.

Paguyuban IKPN Bintaro melihat adanya peluang untuk memperjuangkan warganya untuk tidak terkena relokasi tersebut. Sehingga paguyuban mengadakan musyawarah dengan beberapa warga untuk membuat surat penolakan akan adanya relokasi. Proses koordinasi yang cukup panjang sehingga berjalan selama 1,5 tahun belum menemukan titik terang, sampai pada akhirnya paguyuban mengalami kebuntuan. Memasuki tahun ke 2 ada inisitif warga untuk memanfaatkan moment Pilkada sebagai komoditi politik agar paguyuban beraudiensi dengan gubernur untuk tindak lanjut atas permasalahan relokasi tersebut.

Setelah proses audiensi diterima dengan baik oleh Gubernur DKI Jakarta membuahkan hasil. Dengan dibuatkannya SK Gubernur dari pemerintah daerah untuk adanya perubahan trase/ patok ukur, sehingga patok ukur tersebut di pindahkan sisi seberang sungai dari perumahan IKPN. Dengan perubahan trase tersebut merupakan hasil dari kemampuan masyarakat IKPN dalam bekerjasama sehingga perumahan ikpn selamat dari relokasi.

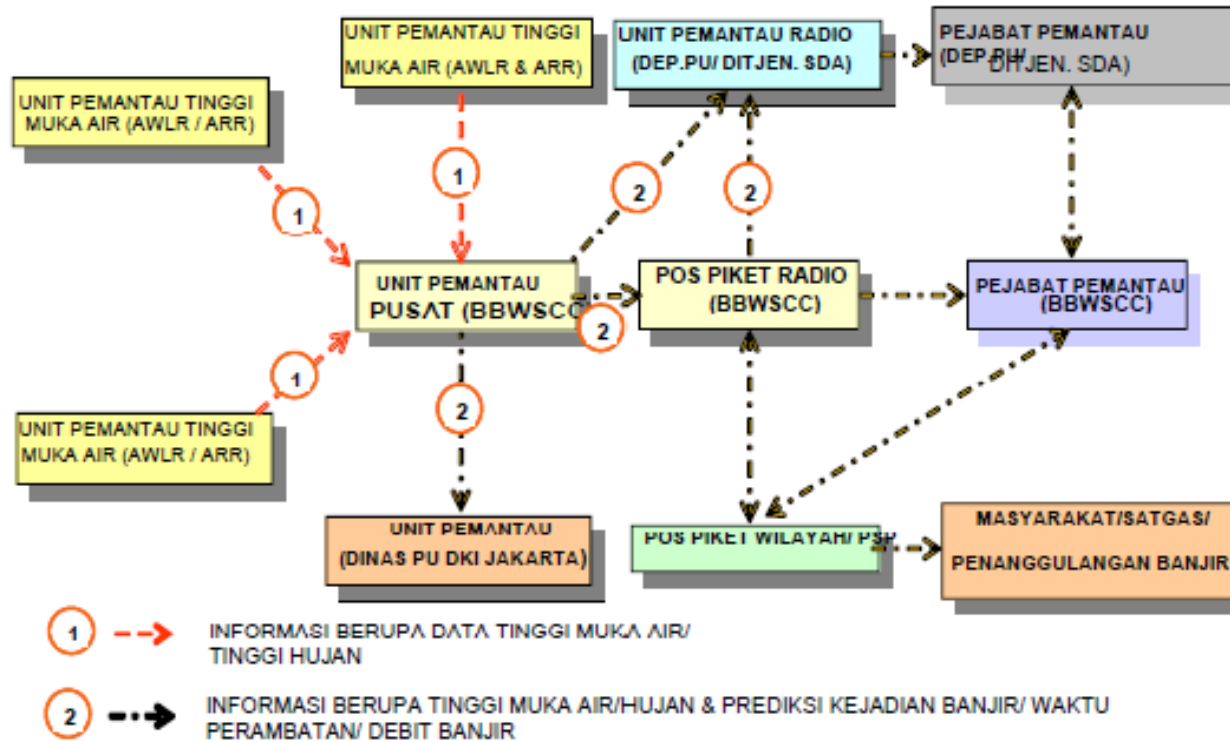
4.2.5 Sistem Informasi Banjir.

Sistem pengumpulan dan berbagi informasi sangat diperlukan dalam pembangunan kesiapan menghadapi bencana. Fungsi penerimaan, pengelolaan dan pendistribusian informasi kebencanaan ini menjadi

tanggung jawab unit pemantau pusat BBWSCC yang kemudian distribusikan ke rumah pompa serta instansi terkait. BBWSCC sebagai penanggung jawab dengan Sistem satu arah ini mempermudah melakukan kebenaran maupun mempercepat penerimaan informasi.

Dalam bidang pertahanan non militer untuk TNI merupakan unsur pendukung berguna juga sebagai penyambung informasi di wilayah yang dibantu oleh masyarakat setempat sebagai mata telinga dari TNI tersebut. TNI yang dalam hal ini diwakili oleh babinsa mampu bersinergik dengan pemerintah daerah dalam hal ini lurah ataupun yang memang menjadi mitra dari koramil, sehingga titik-titik dari banjir dapat diketahui secara akurat. selain itu kodim sendiri sudah memiliki peta rawan bencana banjir. Sehingga dapat mengidentifikasi apabila terjadi intensitas hujan yang cukup tinggi..

MEKANISME PENYAMPAIAN INFORMASI TENTANG KEJADIAN BANJIR MELALUI UNIT TELEMETRY



Gambar 4.4 Mekanisme penyampaian informasi

Informasi berdasarkan pemantauan data ketinggian air maupun intensitas hujan yang terjadi, dikelola unit pusat pemantauan BBWSCC yang kemudian informasi tersebut di distribusikan pos piket wilayah dan instansi terkait. Informasi tersebut biasanya menggunakan radio maupun jejaring sosial karena lebih efektif dan efisien. Penerimaan informasi secara terbuka memudahkan siapa saja untuk mendapatkan informasi.

Sudin SDA memiliki kepala kesatuan pelaksana yang berada di Kecamatan sehingga dapat memberikan laporan terkumpul dengan begitu kecepatan dan akurasi dalam sebuah informasi sangat diperukan. Selain itu adanya rapat pertemuan dengan masyarakat yang secara tidak langsung dapat mengetahui perkembangan dan memberikan himbauan kepada masyarakat

Sudin SDA sendiri memiliki satgas di bawah seksi pemeliharaan dan pengendalian banjir yang tersebar di sepuluh Kecamatan di Jakarta selatan sehingga setiap Kecamatan memiliki 20 satgas yang *standby*. Satu orang penanggung jawab dibawah kepala satuan pelaksana dengan personil 40 orang yang mobilisasi membantu tenaga satgas yang ada di Kecamatan

Pada umumnya masyarakat IKPN sudah mengetahui apabila sudah disiarkan kabar tentang banjir karena banjir yang terjadi bukan hal yang baru lagi sehingga masyarakat sudah mengerti untuk evakuasi ke barang berharga ketempat aman yang lebih tinggi, baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat yang menjadi prioritas utama masyarakat IKPN untuk di evakuasi karena berkaitan dengan keterbatasan akses utama.

Masyarakat IKPN menganggap bahwa Ketersediaan alat *early warning System* (EWS) dianggap kurang efektif. EWS bekerja apabila air nyentuh sensor dengan ketinggian tertentu maka alat tersebut mengeluarkan suara sirine. Dengan keterbatasan informasi yang kurang mendetail justru membuat kepanikan pada masyarakat IKPN. Penyampaian informasi dengan disiarkannya di masjid menjadi pilihan karena informasi yang di berikan lebih mendalam. Hingga akhirnya

dikarenakan keterbatasan perawatan sejak tahun 2012 alat EWS yang dimiliki pompa air IKPN tidak berfungsi. Banjir terbesar pun memperburuk kondisi alat EWS sehingga tidak dapat digunakan kembali.

4.2.6 Respon Siaga Banjir Dan Peran Pemerintah

Perumahan IKPN dalam strata sosial merupakan perumahan masyarakat menengah yang memiliki kemampuan ketahanan ekonomi. Namun sayangnya tidak ada kelompok atau organisasi masyarakat yang dapat mengatasi bencana secara mandiri. Sehingga kerjasama diperlukan untuk mengerahkan pengetahuan, keterampilan, metode dan sumberdaya yang perlu dalam respon bencana.

Dalam respon siaga bencana tanggung jawab pemerintah memainkan peran yang berbeda di setiap instansinya. Kelurahan membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk mengedepankan basis masyarakat sebagai kunci dari pengurangan risiko bencana. Adapun anggotanya merupakan para perwakilan dari setiap Rukun warga untuk mengawasi dan mempersiapkan terjadinya bencana

BPBD DKI juga melakukan pelatihan dan sosialisasi bencana walaupun masih banyak memiliki keterbatasan dari segi peserta. Setiap kepala Kelurahan di DKI Jakarta sudah mendapatkan pelatihan di bidang penanganan bencana, namun selain itu BPBD tidak menutup diri dari partisipasi masyarakat maupun organisasi kemanusiaan untuk melakukan pelatihan/penyuluhan contohnya NGO *save children* ketika melakukan survey dan pemberdayaan masyarakat, biasanya didampingi ketika memberikan kontigensi. Untuk itu, kegiatan tersebut perlu mendapatkan pendampingan agar sesuai dengan koridor yang benar.

Salah satu peran dari pemerintahan daerah adalah dibuatnya Pekerja Penanganan Sarana Dan Prasarana Umum (PPSU) yang berada dibawah Kelurahan Bintaro. Bertugas untuk mengurangi sampah yang berada diperumahan IKPN Bintaro agar tidak terjadi pendangkalan dan penyumbatan pada aliran sungai. Selain itu, PPSU juga bertugas untuk pengangkutan sampah hasil dari kolakan yang berada dirumah pompa.

Proses pengurusan saluran air dari endapan lumpur maupun sampah dilakukan juga oleh PPSU sebagai upaya normalisasi saluran air yang ada.

Dalam respon bencana hal yang paling utama adalah evakuasi/ penyelamatan. Dengan kemapanan ekonomi yang dimiliki masyarakat IKPN memungkinkan membangun 2 lantai pada rumahnya, sehingga mayoritas masyarakat IKPN memiliki tempat evakuasi sementara di lantai 2 rumah mereka. Walaupun sudah diberikan himbauan untuk segera evakuasi ke tempat pengungsian. Namun lantai 2 rumah mereka menjadi pilihan karena faktor keamanan dan kenyamanan barang berharga yang berada di dalam rumah.

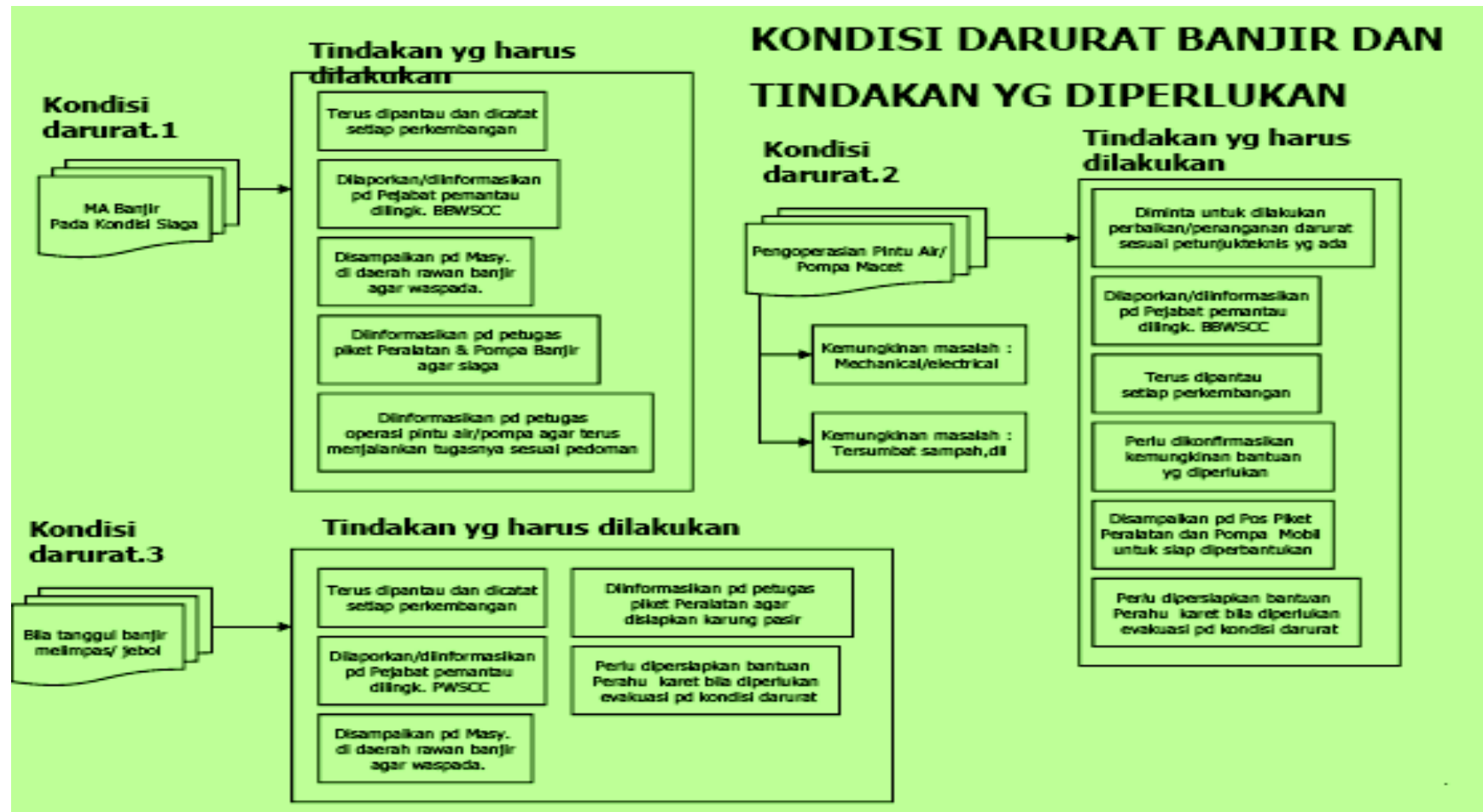
Evakuasi yang dilakukan dengan menyelamatkan keselamatan jiwa dan barang berharga pada umumnya merupakan tanggung jawab diri sendiri. Keterbatasan kemampuan evakuasi masyarakat membutuhkan bantuan profesional dalam bidang penyelamatan. Badan pencarian dan pertolongan/*Search and rescue* atau lebih dikenal dengan SAR adalah badan profesional dalam bidang penyelamatan. Pada banjir yang terjadi diperumahan IKPN dengan ketinggian air tertentu, badan SAR di terjunkan untuk membantu evakuasi masyarakat IKPN ke tempat aman, baik ke dataran yang lebih tinggi maupun ke tempat pengungsian yang sudah disediakan. Selain itu badan SAR melakukan pengontrolan berkala bagi masyarakat IKPN untuk mengetahui keadaan setiap warganya yang berada tinggal di lantai 2 rumah mereka.

Adapun untuk keperluan evakuasi perumahan IKPN memiliki 2 buah perahu karet yang diberikan oleh Kecamatan 1 buah berada di Kelurahan dan lainnya di kantor RW walaupun keadaannya sekarang sangat memprihatinkan sehingga tidak dapat digunakan, sehingga dalam mengevakuasi dan melakukan pengontrolan perumahan IKPN dapat digunakan.

Perumahan IKPN sendiri memiliki Shelter di sebuah sekolahan yang berada di tengah perumahan sebagai tempat pengungsian. Pengungsian publik tetap perlu dilakukan sebagai fasilitas masyarakat yang tidak memiliki rumah tingkat lantai 2 selain itu keberadaan

pengungsian mempermudah dalam mengontrol maupun mendistribusikan bantuan.

Selain pemenuhan kebutuhan pokok, yang perlu diperhatikan adalah kesehatan dari para pengungsi. Kelurahan berkoordinasi dengan pukesmas untuk mengontrol masyarakat IKPN apabila ada yang terkena penyakit dengan memberikan pengobatan gratis bagi warga.



Gambar: 4.5 tindakan dalam kondisi darurat

Sekolahan SDN 05 Pagi Bintaro didirikan pada tahun 1993. Menurut Hartono Sekolah tersebut sengaja didisain menyesuaikan dengan kebutuhan untuk tempat pengungsian. Lokasi sekolah berada di tengah perumahan sehingga mempermudah dalam mengevakuasi masyarakat IKPN. Dengan kapasitas 3 lantai dan memiliki kamar mandi disetiap lantainya menjadikan sekolah tersebut strategis dan cocok sebagai tempat pengungsian. Sekolah dipilih sebagai tempat pengungsian karena mempertimbangkan faktor keamanan pada benda berharga milik pengungsi sehingga terbatas khusus bagi masyarakat IKPN. Sehingga dapat mengetahui apabila terdapat warga diluar masyarakat IKPN

Dalam proses tanggap darurat yang tak luput dari perhatian adalah adanya penyaluran bantuan kepada korban bencana. Bantuan diberikan baik dari organisasi, masyarakat dan pemerintah. Berkumpulnya bantuan masyarakat berdasarkan rasa empati sehingga menimbulkan rasa solidaritas dimasyarakat yang menunjukkan kepedulian terhadap para korban bencana. Bantuan yang dikumpulkan biasanya dalam kebutuhan primer. Besarnya bantuan pendistribusian terkadang menjadi kendala tersendiri. Untuk itu dibutuhkan manajemen yang baik untuk proses pengumpulan maupun pendistribusiannya

Perumahan IKPN memiliki paguyuban yang di dalamnya ada Tim banjir. Ketika terjadi tanggap darurat bencana perwakilan dari tim banjir yang terdiri dari warga yang sudah diberikan mandate dan perwakilan dari ketua RT/RW menjaga POSKO banjir untuk mengakomodir penerimaan bantuan langsung dari masyarakat sekitar, sehingga masyarakat diluar perumahan IKPN yang ingin berpartisipasi memberikan bantuan mendapatkan konfirmasi secara langsung dari pejabat setempat.

BPBD merupakan leading sektor dalam pemberian bantuan yang datang berasal dari pemerintah. Bantuan yang diberikan pun beraneka ragam bergantung kebutuhan di lapangan. Untuk kebutuhan bayi sandang BPBD telah menyiapkan seperti pakaian anak, popok, pakaian bayi, sampai dengan botol bayi, minyak kayu putih dan perlengkapan bayi

lainnya, untuk keluarga BPBD memiliki family kit yang terdiri dari daster, pakaian dalam, dan pakaian tidur bergantung kepada kebutuhan dilapangan.

Dalam proses pendistribusian bantuan BPBD DKI bermitra dengan Kelurahan Bintaro setelah melakukan analisis kebutuhan dilapangan BPBD juga melakukan pendampingan kepada kepala Kelurahan untuk proses pengambilan keputusan. Ketika terjadi bencana BPBD sendiri harus memiliki berita acara dari Kelurahan. Karena kelurahan yang menentukan kemampuan warganya, bagi warga yang mampu biasanya sudah tidak diberikan bantuan.

Dalam sebuah bencana perlu mendirikan dapur umum untuk pemenuhan kebutuhan para korban bencana. Pendirian dapur umum didirikan oleh tagana dengan dibantu oleh warga dan berbagai lapisan masyarakat yang ikut terlibat dalam penanganan bencana banjir. Tagana juga biasanya membantu dalam pengadaan logistic INamun hal tersebut bergantung kepada kebutuhan dari para korban, dapur umum terletak di luar perumahan IKPN bergabung dengan posko banjir untuk membantu masyarakat IKPN yang berada di pengungsian. Karena dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat yang bertahan di rumah masing masing pada umumnya memiliki stok makanan untuk bertahan hidup.

Dalam upaya pengontrolan perumahan IKPN banyak pihak yang terlibat. Dalam satu hari saja ada sekitar 5 buah perahu yang melakukan pengontrolan banjir, baik dari tim sar, polisi maupun TNI Biasanya ada lima perahu karet yang mengontrol, dan kalo malam biasanya TNI dan polisi Biasanya juga warga sebagian ada warga yang punya perahu karet untuk pribadi

Ketangguhan masyarakat keurnya perumahan IKPN dari peta rawan bencana Menurut BPBD DKI untuk memasukan ataupun mengeluarkan suatu lokasi keluar dari peta rawan banjir. “Ketika suatu lokasi selama 3 tahun berturut-turut dengan durasi yang cukup lama dapat dimasukan ke dalam peta rawan bencana banjir, sehingga lokasi tersebut menjadi prioritas untuk dilakukan antisipasi”.

Menurut BPBD Bencana banjir dapat dikatakan bencana banjir melalui indikator yaitu air yang meluap dan menggenangi rumah warga lebih 24 jam dengan ketinggian atas 1 meter. Apabila luapan air yang terjadi dengan durasi dibawah 6 jam dan ketinggian di bawah 30 cm atau maka dikatakan genangan air. Ketika perumahan IKPN terjadi luapan air dapat di katakan bencana banjir melalui indicator ini.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Solidaritas Masyarakat Menengah Perkotaan Dalam Menghadapi Bencana Banjir

Dalam pengurangan risiko bencana berbasis Masyarakat memandang masyarakat sebagai kunci dari keberhasilan mengelola risiko bencana (Twigg, 2015). sumber utama yang di miliki oleh Masyarakat IKPN dapat dimanfaatkan dengan terbentuknya kesadaran sosial masyarakat yang hidup dalam satu lingkungan berdasarkan rasa solidaritas. Dengan terbangunnya suatu komunitas/paguyuban ini membuktikan adanya rasa solidaritas/kesetiakawanan anat individu yang merupakan bentuk dari rasa sepenanggungan terdampak bencana banjir.

Solidaritas sosial adalah perasaan secara kelompok memiliki nilai nilai yang sama atau kewajiban moral untuk memenuhi harapan-harapan peran (Nasution, 2009). Rasa kesatuan untuk berdasarkan satu pemukiman IKPN merupakan hal yang sangat penting dalam membangun solidaritas. Solidaritas sosial juga dipengaruhi interaksi sosial yang berlangsung karena ikatan kultural, yang pada dasarnya disebabkan munculnya *sentiment community* (Nasution, 2009). Dengan dibentuknya paguyuban IKPN sebagai tempat berinteraksi, bermusyawarah dan bersilaturahmi dalam membangun emosional antar masyarkat Selain itu paguyuban merupakan ruang aspirasi warga dalam menghadapi permasalahan bersama. Terbentuknya Paguyuban merupakan suatu kesadaran kolektif dari masyarakat IKPN. ada empat dimensi membentuk kesadaran kolektif (Giddens, 1973).

1. Keterikatan, Adanya keterikatan dalam satu wilayah perumahan IKPN
2. Kekuatan, adanya perasaan sepenanggungan (korban bencana/dalam satu permasalahan)
3. Kejelasan yaitu paguyuban tersebut memiliki tujuan yang jelas yaitu terhindar dari risiko bencana
4. Isi merupakan sesuatu yang dihasilkan dari paguyuban dan dapat dirasakan.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa solidaritas masyarakat IKPN dapat terbangun karena adanya kesadaran sosial masyarakat dalam suatu keterikatan pada persamaan untuk membentuk paguyuban sebagai ruang interaksi sosial dengan tujuan yang sama. Masyarakat IKPN dapat memanfaatkan kesadaran sosial masyarakat yang hidup dalam satu lingkungan menjadi rasa saling peduli atau solidaritas.

4.3.2 Bentuk Solidaritas Masyarakat Dan Partisipasi Masyarakat

Konsep solidaritas merupakan kepedulian secara bersama kelompok yang menunjukkan pada suatu keadaan hubungan antar individu dan berdasarkan persamaan (Nasution, 2009). Dengan prinsip dasar tolong menolong salah satu bentuk solidaritas adalah gotong royong yang dapat menjadi kekuatan persatuan dari perumahan IKPN.

Bentuk solidaritas partisipasi masyarakat yang berbentuk Gotong royong adalah istilah yang mengacu pada kegiatan saling menolong atau saling membantu. (Nasution, 2009). Gotong royong merupakan aktifitas partisipasi dari masyarakat dalam bentuk bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama atau kepentingan umum. Tradisi masyarakat ini biasanya dalam kejabakti maupun kepentingan sosial yang berdasarkan perasaan kepedulian sehingga melibatkan partisipasi sejumlah warga.

Peran membentuk Paguyuban Perumahan IKPN sebagai wadah interaksi sosial masyarakat, dengan adanya gotong royong sebagai sistem sosial merupakan suatu tatanan nilai yang diwujudkan dalam kerja nyata bersifat tolong menolong dalam kehidupan (Bintarto). Partisipasi

masyarakat IKPN dalam membangun tanggul merupakan wujud nyata dari gotong royong. Program yang dilaksanakan oleh masyarakat IKPN bukan hanya berbentuk kerjabakti yang rutin dilakukan dalam upaya realsisasi program bersih bersih Jakarta selatan oleh pemerintah daerah

Dalam situasi normal, gotong royong sering mengalami pelemahan dan kurang berfungsi dengan baik. Sebaliknya, ketika terjadi bencana, sistem sosial ini seperti menemukan energinya kembali, konsep sebagai mekanisme dan hubungan antara kepercayaan, norma, dan jaringan dalam pengaturan sosial di suatu daerah (Woolcock, 1998). Rasa empati dalam masyarakat biasanya akan muncul ketika memiliki rasa sepenanggungan sebagai penguatan fungsi dari sebuah gotong royong. Hal ini terbukti pada hari-hari biasa paguyuban IKPN tidak memiliki program yang signifikan namun ketika terjadi bencana paguyuban tersebut aktif kembali sebagai garda terdepan.

Program yang dilaksanakan oleh masyarakat IKPN bukan hanya berbentuk kerjabakti yang rutin dilakukan. Salah satu bentuk gotong royong paguyuban perumahan IKPN adanya partisipasi dalam membantu warga perumahan yang tertimpa kesulitan, kolektifitas donasi dari masyarakat untuk ketersediaan bahan bakar mesin pompa air. Dengan timbulnya rasa empati terhadap masyarakat membuat masyarakat IKPN saling bergotong royong dalam upaya penanggulangan banjir.

Berdasarkan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk dari solidaritas masyarakat IKPN bersifat gotong royong maupun kerjasama dalam penanggulangan banjir. Partisipasi masyarakat dalam mengurangi beban masyarakat yang sedang mengalami kesulitan berdasarkan rasa empati masyarakat yang timbul dari kesadaran sosial yang dibantu oleh paguyuban sebagai lokomotifnya.

4.3.3 Perbedaan Solidaritas Masyarakat Menengah Perkotaan Dengan Masyarakat Desa

Setiap stratifikasi didalam masyarakat memiliki tingkat sosial yang berbeda. Pembagian kelompok berdasarkan pada solidaritas sosial, yaitu suatu keadaan dimana hubungan antara individu dan kelompok

berdasarkan perasaan kepercayaan (Soekanto, 2016). Dengan adanya stratifikasi dalam kehidupan bermasyarakat mempengaruhi kecenderungan tingkat kepercayaan sehingga hubungan yang terjalin pada umumnya merupakan kesetaraan dari strata sosial. Hal ini pun senada dengan pendapat Nurdin bahwa Setiap status menjalin hubungan relasional satu sama lain karena sifat relasional status dibebankan dengan tanggung jawab. Pengaruh stratifikasi sangat penting yaitu dapat mempengaruhi dalam memperoleh kesempatan (Nurdin, 2006). Membangun kesadaran solidaritas merupakan perasaan kepedulian dengan dasar sebuah tingkat kepercayaan masyarakat.

Sistem stratifikasi merupakan perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat, yang diwujudkan dalam kelas tinggi, kelas sedang/menengah dan kelas rendah (Waluya, 2007). Perbedaan tersebut biasanya di tentukan oleh masyarakat itu sendiri. Dengan adanya perbedaan masyarakat kelas biasanya bergantung pada kemampuan material.

Stratifikasi sosial memiliki dua sifat, yaitu bersifat tertutup dan bersifat terbuka (Waluya, 2007). Sifat ini menentukan bahwa stratifikasi dapat diberikan kepada individu ataupun tidak.

1. Bersifat tertutup, merupakan stratifikasi yang membatasi pengakuan menjadi kelahiran atau yang biasa dikenal dengan kasta.
2. Bersifat terbuka merupakan stratifikasi yang memberikan kesempatan bagi siapapun tentunya dengan ketentuan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat tersebut.

Berdasarkan sifatnya masyarakat IKPN merupakan stratifikasi bersifat terbuka yang memberikan kesempatan bagi siapasaja dengan ketentuan berdomisili di perumahan tersebut. Masyarakat IKPN merupakan masyarakat dengan strata kelas menengah sesuai dengan kriteria dalam mendapatkan pengakuan kelas menurut syarbaini dapat dimiliki melalui:

1. Property (masyarakat IKPN merupakan perumahan tertata yang berada di pinggir kota Jakarta)
2. Prestise (memiliki tingkat pendidikan, keberadaan perumahan IKPN di ibukota yang mayoritas memiliki pendidikan minimal SMA)
3. Power (memiliki pekerjaan, perumahan pegawai negeri yang mayoritas adalah pegawai negeri serta pegawai swasta)

Dalam analisa komparatif yang dilakukan dukheim mengenai kesadaran masyarakat. analisis yang didapat bahwa masyarakat desa disatukan oleh fakta sosial non material dengan kuatnya ikatan moralitas bersama. Masyarakat IKPN merupakan masyarakat menengah yang memiliki sifat sebagai masyarakat mekanik dan masyarakat organik secara tidak utuh.

Solidaritas mekanik pada umumnya dimiliki oleh masyarakat pedesaan karena keterikatan dengan tingginya kepercayaan sehingga memiliki kesadaran kolektif. Sedangkan solidaritas organik umumnya dimiliki oleh masyarakat perkotaan yang muncul dari ketergantungan antara individu atau kelompok dengan kepercayaan bersama, cita-cita dan moral. Hal inilah yang menjembatani peran paguyuban terhadap solidaritas tersebut.

Durkheim meyakini perubahan solidaritas modern menjadi solidaritas pedesaan disebabkan oleh dinamika penduduk. Konsep ini merujuk pada jumlah dan banyak interaksi masyarakat. adanya kegiatan kerja bakti setiap bulannya merupakan ruang interaksi masyarakat, selain itu masyarakat IKPN juga secara rutin mengadakan koordinasi antar tokoh masyarakat sehingga menjadikan masyarakat IKPN menjadi masyarakat mekanik secara tidak utuh.

Perubahan masyarakat berjalan dengan cepat karena meningkatnya pembagian kerja yang menghasilkan suatu kebingungan tentang norma dan semakin meningkatnya sifat yang tidak pribadi dalam kehidupan sosial. Hal ini mengakibatkan runtuhnya norma-norma sosial yang mengatur perilaku, yang disebut juga dengan *anomie* (Giddens, 1986). Keadaan

Menurut Nasution perubahan solidaritas sosial tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Pendidikan, dengan adanya pendidikan yang tinggi sehingga masyarakat dapat berpikir lebih luas dan lebih memahami arti dan kewajiban mereka sebagai manusia.
2. Perubahan tingkat sosial dengan adanya paguyuban menyamakan strata sosial yaitu masyarakat perumahan.
3. Sikap egoistik, sikap mementingkan kepentingan pribadi terjadi karena adanya rasa sepenanggungan sebagai korban bencana.

Dengan adanya paguyuban merubah solidaritas sosial masyarakat perumahan IKPN sebagai masyarakat modern sebagai solidaritas organik menjadi solidaritas mekanik. Perubahan solidaritas dapat terjadi berdasarkan sistem kepercayaan yang terbangun dalam masyarakat. (Twigg, 2015) Dengan intensitas interaksi kepada masyarakat IKPN membuat masyarakat lebih peduli dengan orang lain

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan stratifikasi berpengaruh dalam solidaritas sosial. Namun dengan tingginya interaksi masyarakat membangun kepercayaan masyarakat membuat tumbuhnya kepedulian dimasyarakat Sehingga terjadi perubahan solidaritas atas dasar kesadaran sosial.

4.3.4 Solidaritas Sebagai Modal Sosial

Lawan dari kerentanan adalah ketangguhan dan harapan untuk membangun ketangguhan tercermin dalam visi penanggulangan bencana di Indonesia. (Maarif, 2000) upaya dalam melawan kerentanan masyarakat IKPN dengan adanya paguyuban berperan dalam menghadapi keresahan masyarakat terhadap adanya isu penggusuran program normalisasi sungai Pesanggrahan dari pemerintah pusat dibawah kementerian PUPR.

Pemikiran yang melandasi dalam strategi menuju ketangguhan antara lain: (1) Jauhkan masyarakat dari bahaya, (2) Jauhkan bahaya dari masyarakat, (3) *Living harmony with risk*, dan (4) Tumbuhkembangkan kearifan lokal.

Dengan inisiatif masyarakat mendirikan paguyuban menanda bahwa masyarakat IKPN memiliki Ketangguhan hal ini sesuai dengan Maarif bahwa masyarakat yang tangguh memiliki ciri-ciri yaitu:

1. Memiliki daya informasi, Informasi yang didapatkan dari unit pemantauan ketinggian air didistribusikan melalui rumah pompa sehingga dapat di umumkan melalui pengeras suara masjid sehingga dapat terdengar oleh seluruh masyarakat di Perumahan IKPN, selain itu adanya kemajuan teknologi seperti group WA dapat mempercepat dalam mendapatkan akses Informasi.
2. Kemampuan antisipasi setiap ancaman atau bahaya yang terjadi. Setelah informasi diterima dengan baik, masyarakat mulai mengevakuasi barang berharga ke tempat yang lebih aman adanya serta meningkatkan tingkat kewaspadaannya terhadap datangnya banjir.
3. Kemampuan melawan atau menghindari dari ancaman bahaya tersebut. Ketika terjadi bencana dengan kemampuan ekonomi yang dimilikinya, sebagian masyarakat bertahan di lantai 2 rumah mereka, selain itu masyarakat IKPN sudah memiliki tempat pengungsian yang di khususkan untuk warga IKPN. Kemudian ada juga masyarakat yang memilih untuk meninggalkan rumah mereka.
4. Kemampuan untuk mengadaptasi bencana dan dampak yang ditimbulkan. Dengan sistem informasi yang cukup baik membuat masyarakat IKPN mampu mengantisipasi terjadinya bencana. Serta adanya langkah antisipasi seperti pembangunan tanggul dan kerja bakti.
5. Kemampuan untuk pulih kembali kemampuan masyarakat dapat di ketahui ketangguhan melalui daya lenting/ pulih kembali pada pasca bencana. bencana banjir hanya sebatas momentum saat bencana karena pasca bencana masyarakat IKPN Kembali melakukan aktifitas seperti biasanya.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat solidaritas masyarakat IKPN mengacu pada ciri ketangguhan masyarakat,

sehingga dapat menjadi modal sosial. Penanggulangan bencana berbasis masyarakat merupakan keberhasilan dari kesadaran masyarakat mengenai bencana.

4.3.5 Sistem Informasi Banjir

Sistem komunikasi yang baik adalah penyebaran informasi satu arah oleh para spesialis untuk komunikasi dengan pertukaran informasi antara spesialis dan masyarakat (Twigg, 2015). Metode partisipatif telah memainkan peran sentral dalam hal ini perubahan pendekatan dengan adanya komunikasi satu arah mempermudah dalam mempertanggung jawabkan informasi yang diterima

Pendistribusian informasi kepada masyarakat menjadi catatan utama bagaimana informasi dapat diterima dengan baik. Metode informasipun beraneka ragam, dengan adanya kesepakatan terlebih dahulu informasi akan jauh lebih mudah diterima. Contohnya dengan metode kantong dapat diketahui akan isi informasi tersebut baik untuk berkumpul ataupun penyampaian informasi bencana.

Informasi dapat diberikan melalui media sosial dan perangkat digital lainnya seperti aplikasi *smartphone* memungkinkan orang melaporkan lokal mereka kondisi setelah bencana, membantu lembaga bantuan (Twigg, 2015). Informasi yang disampaikan dengan baik membuat masyarakat IKPN lebih waspada akan menghadapi banjir. Sehingga sekalipun banjir tak berdampak signifikan membuat masyarakat lebih waspada dengan memilih menunggu perkembangan banjir di depan rumah mereka.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi yang baik adalah dengan penyampaian informasi yang dapat diterima seutuhnya dan dipertanggung jawabkan dengan metode yang menyesuaikan penerima informasi. Metode partisipatif masyarakat IKPN yang terorganisir telah memainkan peran yang baik karena dengan berkoodoansinya masyarakat dengan pemerintah dan masyarakat IKPN sendiri.

4.3.6 Respon Siaga Banjir Dan Peran Pemerintah

Bencana adalah masalah kompleks yang menuntut respon holistik dari perbedaan ini kelompok disipliner dan kelembagaan (Twigg, 2015), sehingga dalam aspek pengurangan risiko bencana ataupun penanggulangan bencana membutuhkan kerjasama antara masyarakat, pemerintahan dan organisasi lainnya.

Dalam siaga bencana menjadi tanggung jawab pemerintah dengan dibentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta pelatihan dan sosialisasi dari BPBD DKI merupakan upaya untuk meminimalisir dampak dari bencana untuk itu diperlukan kerjasama yang baik dari pemerintah dan masyarakat. Dalam kondisi darurat koordianasi antara sipil dan militer dalam bencana adalah berbagi informasi dalam keadaan darurat

Kesiapsiagaan untuk merespon bencana secara efektif perlu diperkuat pada setiap tingkatan (Twigg, 2015). Pemerintah harus memahami mekanisme respon yang telah ada, walikota sebagai pengambil kebijakan untuk memprogram PRB dan merespon penanggulangan bencana yang dibantu oleh Kodim sebagai pendistribusian bantuan dan polsek sebagai pengamanan, baik pengaman lalulintas ketika terjadi bencana maupun pengamanan barang- barang yang di evakuasi. .

Dalam respon bencana hal yang paling utama adalah evakuasi/ penyelamatan. Pada penentuan respon juga harus mencakup rute evakuasi dan tempat pengungsian publik (Twigg, 2015). Masyarakat yang berisiko harus mengetahui jalur evakuasi dan tempat pengungsian. Agar mereka dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko bencana Dengan keamanan ekonomi yang dimiliki masyarakat IKPN memungkinkan membangun 2 lantai pada rumahnya. Keterbatasan kemampuan evakuasi masyarakat membutuhkan bantuan profesional dalam bidang penyelamatan. Badan pencarian dan pertolongan dalam bahasa inggris *Search and rescue* atau lebih dikenal dengan SAR adalah badan profesional dalam bidang penyelamatan. Dalam proses tanggap

darurat yang tak luput dari perhatian adalah adanya penyaluran bantuan kepada korban bencana. Bantuan diberikan baik dari organisasi, masyarakat dan pemerintah BPBD merupakan leading sektor dalam pemberian bantuan yang datang berasal dari pemerintah.

Pada dasarnya setiap penanganan banjir pasti memiliki kendalanya masing2 akan tetapi namun demikian selama stakeholdernya disini sudah berjalan dengan baik baik dari dinas sosialnya, BPBD, kodim , koramil, polsek sudah berjalan maksimal sehingga kendala tersebut dapat di hadapi bersama2, sedangkan untuk kodim sendiri jika dalam penanganan banjir yang terjadi membutuhkan beberapa titik sedangkan tenda yang kodim miliki terbatas, mungkin termasuk kendala teteapi dapat meminjam kepada satuan tetangga

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penanganan maupun pengurangan risiko bencana merupakan tanggung jawab pemerintah namun kerjasama masyarakat diperlukan sebagai kunci dari keberhasilan tersebut. Dalam kondisi darurat koordianasi antara sipil dan militer dalam bencana adalah berbagi informasi dalam keadaan darurat. Kerjasama masyarkat dengan pemerintah harus berjalan bersama secara sinergis, dan terpadu

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil analisis dan pembahasan terkait dengan solidaritas masyarakat IKPN Bintaro sebagai pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1.1 Solidaritas Masyarakat Menengah Perkotaan Dalam Menghadapi Bencana Banjir

Keberhasilan pengurangan risiko dengan mengedepankan masyarakat sebagai kunci dan sumber utama berjalan efektif, dengan terbangunnya suatu komunitas/paguyuban ini membuktikan adanya rasa solidaritas antara individu. Perubahan solidaritas masyarakat IKPN karena di topang tingkat pendidikan yang menyadarkan atas sebuah kepedulian antar sesama. Sebagai masyarakat modern perumahan IKPN memiliki solidaritas yang kuat karena adanya rasa sepenanggungan. Dengan bentuk solidaritas berupa:

1. sebagai jaringan informasi dalam penanggulangan banjir.
2. sebagai ruang atau wadah interaksi masyarakat IKPN
3. aktor yang mengumpulkan secara selektif sumbangan dari swadaya masyarakat untuk kepentingan pengendalian banjir
4. Pemantauan perkembangan banjir,
5. Relawan dalam penyediaan posko dan bantuan
6. Ruang apresiasi masyarakat dalam memperjuangkan tanah IKPN
7. Pendistribusian bantuan

5.1.2 Respon Siaga Banjir Dan Peran Pemerintah Sebagai Stakeholder

Dalam aspek pengurangan risiko bencana dan penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah yang bekerjasama dengan masyarakat, dan organisasi lainnya. Kompleksitas bantuan pemerintah harus sesuai dengan tupoksi instansi kelembagaan.

BPBD merupakan koordinator dari berbagai instansi yang berperan sebagai pengarah dalam penanganan bencana yang mengatur dan mengontrol ketersediaan bantuan yang diperlukan. Dengan mempertahankan solidaritas penggerak sukarela masyarakat membawa dampak pada keberhasilan pembangunan.

Penanggulangan bencana yang dilakukan pemerintah dan masyarakat IKPN sudah memadai. Dengan seringnya terjadi bencana banjir membuat masyarakat IKPN sudah terlatih dalam menghadapinya membuat terselenggaranya penanggulangan bencana yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi merupakan upaya dalam menciptakan ketangguhan masyarakat. Ditambah Interaksi paguyuban IKPN Bintaro dengan pemerintah menjadi jembatan informasi dari masyarakat, sehingga terciptanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Teoretis

Terdapat beberapa saran teoretis untuk pengembangan penelitian selanjutnya:

- 1) Dalam teori Durhkeim sikap solidaritas mekanik maupun organik dalam penelitian di IKPN tidak dapat digunakan secara utuh, karena perlu ada penambahan sesuai kekhasan wilayah penelitian, adanya aktifitas sosial utama, struktur ekonomi dan kontrol sosial sebagai masyarakat organik meskipun perumahan IKPN berada di perumahan umum ternyata masih terdapat

solidaritas mekanik. Untuk itu perlu adanya penelitian lebih dalam tentang teori solidaritas.

- 2) Adanya solidaritas terhadap masyarakat menengah perkotaan dengan memiliki kemampuan ekonomi yang kuat masyarakat perkotaan memiliki tingkat solidaritas yang tinggi. Artinya tingkat pendapatan yang tinggi tidak berpengaruh terhadap solidaritas masyarakat yang tetap kuat, ini berbeda tentunya dengan teori Durkheim yang menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin rendah tingkat solidaritasnya.

Banjir telah memperkuat solidaritas masyarakat di IKPN, karena masyarakat menganggap adanya kepentingan bersama (*common interest*). Bila dalam solidaritas mekanik ada tokoh yang menyatukan masyarakat yang relative homogen kondisinya (misalnya tokoh agama). Apabila di perkotaan yang heterogen perlu ada faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya solidaritas yakni ancaman agen eksternal (dalam hal ini banjir) yang membangkitkan kepentingan bersama untuk mengatasinya.

- 3) Dalam teori sosial kapital John Twigg penelitian di perumahan IKPN memiliki kesesuaian, bahwa masyarakat di daerah rawan bencana biasanya beradaptasi dengan situasi agar memiliki strategi dalam bertahan hidup berdasarkan pada sumberdaya yang mereka miliki

5.2.2 Saran Praktis

Pemerintah Daerah

1. Adanya masyarakat perkotaan perlu diberikan pelatihan dan penyuluhan, karena bagi masyarakat perkotaan yang belum terbiasa menghadapi banjir akan mengalami kesulitan.
2. Memastikan diadakannya pelatihan serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membangun kesadaran dalam upaya sadar akan bencana.
3. Mengurangi adanya rotasi jabatan untuk mempermudah koordinasi karena terkait.

4. Adanya pendataan sejarah banjir dan ketinggian air yang terjadi di setiap Kelurahan.
5. Mendesain pendidikan dan sosialisasi dalam membangun kesadaran masyarakat.
6. Melakukan pembangunan dan perbaikan tanggul yang telah dimakan usia

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, T. dan Van Der Leeden, A. C. (1986). *Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ghony, M. D. DAN Al-Manshur, F. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Anwar, H.Z dan Harjono, Hery. (2006). *Mengapai cita-cita masyarakat tangguh bencana alam di Indonesia*.
- Creswell, J. W. (2016) *research design : pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*, edisi ke 4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gunawan. R (2010) *Gagalnya sistem kanal pengendalian banjir Jakarta dari masa ke masa*, Jakarta Kompas
- Giddens, A. (1986) *kapitalisme dan teori sosial modern: Suatu Analisis Terhadap Analisis Karl Marx, Durkheim, dan Max Weber* terj. Kramadibba, S Jakarta: universitas Indonesia press.
- Herdiansyah, H. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Jamaluddin, A. N. (2015) *Sosiologi Perkotaan*, Bandung: Pustaka Setia
- Jhonson, D. P. (1998). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* terj. Robert M.Z Lawang. Jakarta: PT. Gramedia
- Kementerian RI. (2008). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Dephan RI Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor. Kep/25/m/1/2014.
- Maarif, S. (2012) *Pemikiran Dan Gagasan Penanggulangan Bencana Di Indonesia*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Z. (2009). *Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi*. Malang: UMM Press.
- Nurdin, M. A. (2006). *Mengerti Sosiologi Pengantar Konsep-Konsep Sosiologi*. Jakarta: UIN Jakarta Press.

- Ritzer, G dan Goodman D. J. (2004). *Teori Sosiologi* terj. Nurhadi, Bantul: kreasi wacana.
- Shadily, H. (1993). *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soedarsono, Juwono. (2001). *Pertahanan dan Keamanan: Masalah Bersama Kita*. Editor: Dr. Indria Samego. *Sistem Pertahanan Keamanan Negara: Cetakan Pertama*. The Habibie Center: Jakarta
- Soekanto, S. (2016). *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: Rajawali Press.
- Syarbaini, S et. All (2004) *sosiologi dan politik*: PT. Ghalia Indonesia Bogor
- Twigg, J. (2015). *Disaster risk reduction*. London: *humanitarian policy group overseas development institute*.
- Waluya, Bagja. (2007) *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Jakarta: PT. Setia Purna.
- Wijayanti, A. (2015). *Solidaritas Sosial Ethnis Tionghoa dalam Pelaksanaan Upacara*.
- Zulkarnaen, N (2009). *Solidaritas sosial partisipasi masyarakat desa transisi*. Malang: UMM Press

JURNAL

- Nugroho, Sutopo Purwo. (2005). Analisis Curah Hujan Penyebab Banjir Besar di Jakarta Pada Awal Februari 2007. *JAI*. Vol.4 No.1 hal. 50-55
- Rusata, Tatang. (2015). Kelas Menengah Baru dan Tantangannya Bagi Industri Pariwisata Indonesia *JKI Vol_10 No_1 2015 –*
- Nizar, Muhammad Afdi.(2015). Kelas Menengah (Middle Class) dan Implikasinya bagi Perekonomian Indonesia diunduh dari [http://www.researchgate.net/publication/279406954_Kelas_Menengah_\(Middle_Class\)_dan_Implikasinya_Panorama_Sentrawisata](http://www.researchgate.net/publication/279406954_Kelas_Menengah_(Middle_Class)_dan_Implikasinya_Panorama_Sentrawisata). Primary Report Panorama Sentrawisata, Tbk Pefindo Equity Valuation April (2014)

ARTIKEL ONLINE**BADIKLAT KEMENKEU**

Widiatanati Heru (2015) penghasilan kelas menengah naik
<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/21014-penghasilan-kelas-menengah-naik-potensi-pajak>
[online] pada tanggal 1 maret 2017.

BNPB. (2016). *Potensi Ancaman Bencana*. Diakses dari
<http://www.bnpb.go.id/pengetahuan-bencana/potensi-ancaman-bencana> [online] pada tanggal 20 Agustus 2016.

BNPB. (2016). *Sejarah dan Visi Misi BNPB*. Diakses dari
<http://dibi.bnpb.go.id/> [online] pada tanggal 20 Agustus 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses dari <http://kbbi.web.id/sadar>
[online] pada tanggal 21 Agustus 2016.

Nasution, Z. (2010). *Konflik dan Lunturnya Solidaritas Sosial Masyarakat Desa Transisi*. Diakses dari
<http://berkarya.um.ac.id/2010/02/05/konflik-dan-lunturnya-solidaritas-sosial-masyarakat-desa-transisi-oleh-zulkarnain-nasution>) [online] pada tanggal 25 Februari 2012

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Perlu diperhatikan bahwa pedoman wawancara ini dibuat berdasarkan Sosial Capital dari Jhon Twigg. sehingga ketika di lapangan nantinya tetap diperlukan modifikasi atau penyesuaian dengan Partisipan wawancara yang dihadapi.. Pedoman wawancara bersifat tidak bersifat baku sehingga peneliti bebas untuk mendalami dan mengajukan pertanyaan yang mana mengikuti alur jawaban Partisipan.

Social capital

NO	Daftar Pertanyaan
1.	Apakah bapak/ibu mengetahui tanda-tanda datangnya banjir?
2.	Apa yang bapak/ibu lakukan agar terhindar dari banjir?
3.	Kegiatan tersebut dilakukan berapa kali selama seminggu?
4.	Apa yang dilakukan saat memberikan peringatan dini sebelum kejadian banjir?
5.	<p>Apa yang dilakukan oleh bapak/ibu dalam menghadapi bencana banjir?</p> <p>Apa yang bapak/ibu ketahui tentang karakter banjir di daerah ini?</p>
6.	Bagaimana sikap atau perilaku warga terhadap bantaran kali Pesanggrahan?
7.	Apakah warga disini sudah pernah diberikan penyuluhan tentang pengurangan risiko bencana banjir oleh pihak kelurahan?
8.	Apakah warga disini sudah pernah diikutsertakan oleh pihak kelurahan untuk mendapatkan pelatihan terkait penanggulangan banjir?
9.	<p>Siapa saja yang dilibatkan dalam pelatihan tersebut?</p> <p>Apa yang dilakukan warga setelah mendapatkan pelatihan tersebut?</p>
10.	Saat terjadi banjir, siapa saja/ organisasi/ komunitas apa saja yang untuk membantu bapak/ibu?
11.	<p>Jika ada, dalam bentuk apa bantuan tersebut tersebut?</p> <p>Bagaimana hubungan antar warga di komunitas tersebut?</p>
12.	Bagaimana pola komunikasi antar warga saat memberikan

	informasi akan terjadi banjir?
13.	Bagaimana pola komunikasi antar warga dengan pemerintah saat memberikan informasi akan terjadi banjir?
14.	siapa yang dihubungi saat terjadi kejadian banjir?
15.	Kenapa tokoh tersebut yang dihubungi saat kejadian banjir?
16.	Berapa banyak kira-kira rasio kelompok rentan di komunitas bapak/ibu?
17.	Bagaimana cara sistem penyebaran informasi tentang banjir kiriman di dalam komunitas bapak/ibu?
18.	Apa yang dilakukan warga setelah mendapatkan informasi tersebut?
19.	Apakah hal tersebut efektif?
20.	
21.	
22.	
23.	

LAMPIRAN
HASIL TRANSKRIP WAWANCARA

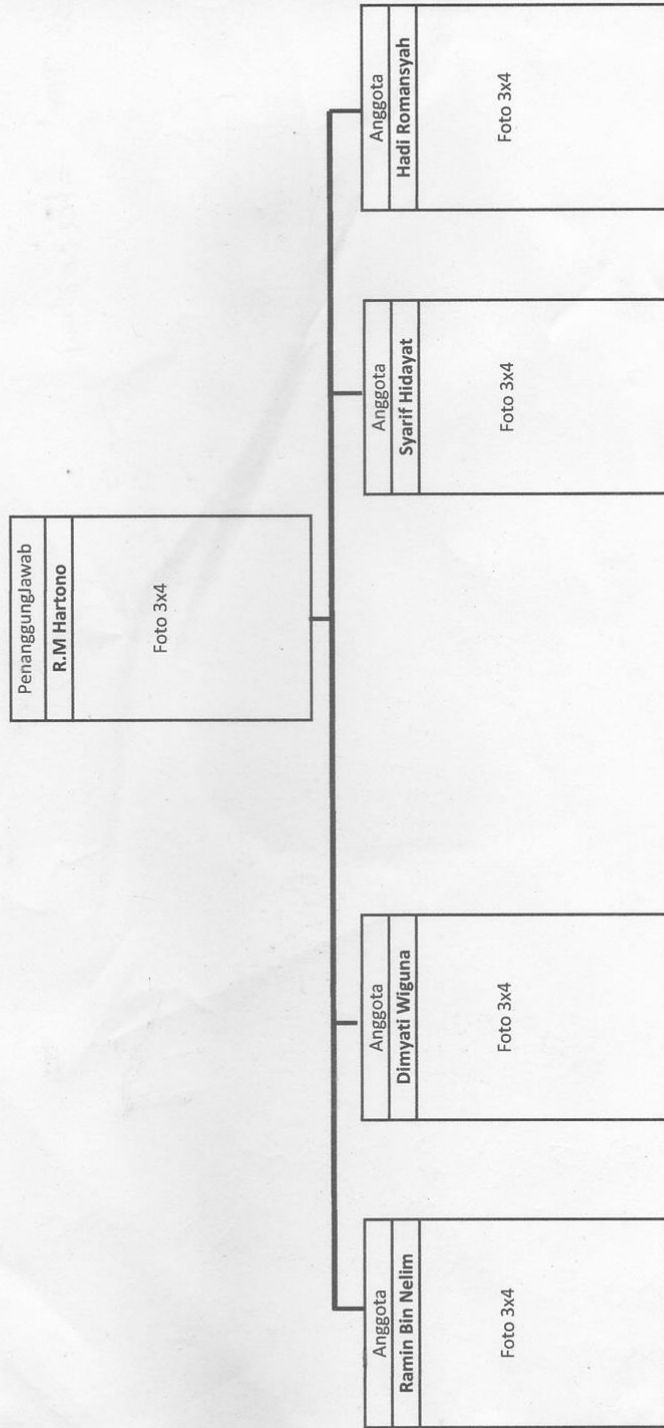
Pertanyaan	jawaban
Apakah bapak/ibu mengetahui tanda-tanda datangnya banjir?	Banjir yang terjadi di perumahan ikpn itu sudah lama terjadi sebelum saya pindah kesini perumahan tersebut telah banjir namun akhir-akhir ini sudah tidak banjir lagi sehingga biasanya masyarakat sudah faham dan tidak panik lagi karena banjir sudah bukan hal yang baru. Walaupun RT saya termasuk di dataran yang cukup tinggi dari perumahan IKPN secara keseluruhan namun hanya beberapa rumah saja yang kurang lebih sekitar 5-6 rumah yang terselamatkan dari banjir. Umumnya banjir terjadi apabila intensitas hujan yang cukup tinggi baik datang dari hulu maupun dari hujan lokal. Sehingga air yang berada di sungai melebihi kapasitas sehingga tidak tertampung dan meluap
Apa yang bapak/ibu lakukan agar terhindar dari banjir?	Biasanya warga dari masyarakat IKPN malakukan gotong royong dalam upaya membersihkan lingkungan,
Kegiatan tersebut dilakukan berapa kali selama seminggu?	Kegiatan gotong royong tersebut dilakukan biasanya 1 bulan sekali, namun biasanya di lakukan dengan surat edaran dari kelurahan karena dalam kegiatan gotong royong tersebut bekerja sama dengan pihak PPSU dalam pengangkutan sampah
Apa yang dilakukan saat memberikan peringatan dini	Pada umumnya masyarakat sudah mengetahui apabila sudah di

sebelum kejadian banjir?	siarkan kabar tentang banjir karena banjir yang terjadi bukan hal yang baru lagi sehingga masyarakat langsung menaikan barang2 ketempat yang lebih tinggi, baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat biasanya hal yang langsung di evakuasi
Apa yang dilakukan oleh bapak/ibu dalam menghadapi bencana banjir?	Biasanya kalo saya mendapatkan berita dari group WA mengenai waspada banjir, lansung saya hubungi penghuni rumah untuk bersiap-siap menghadapi banjir dan mereka sudah mengetahui apa yang yang harus dilakukan, dan barulah saya izin pulang untuk mengkondisikan keadaan rumah
Bagaimana sikap atau perilaku warga terhadap bantaran kali Pesanggrahan?	membangun tanggul awalnya dari swadaya warga dalam bentuk kolektif se ikhlasnya.
Apakah warga disini sudah pernah diberikan penyuluhan tentang pengurangan risiko bencana banjir oleh pihak kelurahan?	Ada, itu dari program kelurahan yang ngadain itu badan penggulangan bencana dki kita juga pernah kok di deplu pelatihanya gitu jadi dari mereka udah disiapin perahu alat2 semuanya cara mengevakuasi di kali semuanya nyebur ke kali pake pelampung semuanya
Apakah warga disini sudah pernah diikutsertakan oleh pihak kelurahan untuk mendapatkan pelatihan terkait penanggulangan banjir?	pesertanya kita itu entah itu pengurus entah itu warga, karang taruna yang mau yakita ajak,
Saat terjadi bencana banjir, siapa saja/ organisasi/ komunitas apa saja yang untuk membantu bapak/ibu?	Ada, paguyuban IKPN Itu sih sebenarnya gak ada program kerjanya sih tapi kita warga komplek kpn yg peduli banjir aja gitu gimana caranya komplek kpn gak banjir cara biar aman dengan begitu kan kita bisa tukar pikiran pas ketemu ngumpul gitu kan ada peran

	tokohnya, masyarakatnya pengurus nya jadi mereka ada masukan mesti gimana. Karna kebetulan kita kan kalau ada misalkan ada kendala kita sama2 ke mencari solusi lihat kondisi kita gimana biar kita ga banjir.
Jika ada, dalam bentuk apa bantuan tersebut tersebut?	Gak ada yang spesial sih gak ada Salah satu kegunaan dari paguyuban tersebut dengan adanya issue penbggusuran terhadap perumahan ikpn, sehingga aspirasi warga dapat tersampaikan kan kita menjelaskan kondisi kita baik dari kondisi sunganya dan kelebihan dari perumahan ikpn dan bagaimana pentataanya perumahannya.
Siapa yang dihubungi saat terjadi kejadian banjir?	Biasanya pak Hartono, karena di yang biasanya stand bye jadi orang-orang kalo tau ada informasi banjir pasti nyariin pak hartono
Kenapa tokoh tersebut yang dihubungi saat kejadian banjir?	dia udah lama ada jadi petugas pompa jadi dia yang paling tau
Berapa banyak kira-kira rasio kelompok rentan di komunitas bapak/ibu?	Kalau untuk lansia disini tidak terlalu banyak Kalo itu warga kita waktu masih banjir jaman dulu biasanya di ungsikan terlebih dahulu baik menggunakan tandu atau pake perahu karet paling ditandu bergiliran
Bagaimana cara sistem penyebaran informasi tentang banjir kiriman di dalam komunitas bapak/ibu?	kalo misalkan hitungan 6 jam itu baru kepala dari ketinggian air yang sampai dari hulu dan kemudian 6 jam berikutnya itu baru setinggi – tinggi air itu bisa paling tinggi [biasanya dikabarin siaga berapa nih] iya liat ketinggian berapa,.pasti kan kita liat monitor gak dari radio aja pasti kan ada dari grup wa. Di berikan kabar untuk siaga ketinggian air

Apa yang dilakukan warga setelah mendapatkan informasi tersebut?	biasanya itu sudah diatur oleh RW, sekarang gini yaa mas, kalo udah banjir biasanya warga langsung mengungsi, jadi tidak perlu repot lagi. Sekarang yang di kita urusin biasanya warga yang berada di tempat pengungsian. Dan biasanya warga langsung keluar untuk evakuasi diri sendiri kalau ada pengumuman mereka tuh sudah tau, biasanya mengeeluarkan mobil udah keluar, motor udah keluar mereka itu udah mengerti
Apakah hal tersebut efektif?	Efektif , orang warganya udah pada tau

**STRUKTUR ORGANISASI
POMPA IKPN BINTARO
JL. Komp. IKPN Bintaro RT.03/04 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan**



SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : B/ 776 /III/2017

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Surat Izin dan
Rekomendasi Pelaksanaan
Penelitian

Bogor, 17 Maret 2017

Kepada

Yth. Kepala Kesbangpol Kab. Bogor

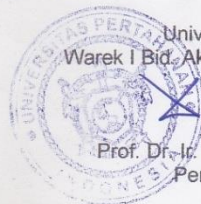
di

Bogor

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
 - b. Kalendar Akademik Program Studi Manajemen Bencana Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2015/2016.
2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:
 - a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
 - b. Mahasiswa Program Studi Manajemen Bencana Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan atas nama Mochamad Guntur, NIM: 120150203020, nomor HP: 081296589772, email: mochiguntur@gmail.com, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Gerakan Solidaritas Masyarakat Menengah dalam Menghadapi Bencana Banjir (Studi Kasus Perumahan Ikatan Koperasi Pegawai Negeri)."
 - c. Sebagai persyaratan untuk melaksanakan penelitian yang akan dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta maka dibutuhkan surat rekomendasi penelitian dari Kesbangpol Kabupaten Bogor.
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon untuk diberikan surat rekomendasi kepada Kesbangpol DKI Jakarta agar mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan izin untuk melaksanakan penelitian di daerah tersebut.
4. Demikian mohon menjadi periksa.

a.n. Rektor

Universitas Pertahanan
Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng
Pembina Utama IV/e

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat
3. Kepala Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta
4. Warek Unhan
5. Karo Aka dan Kemahasiswaan Unhan.

Kawasan IPSC Sentul Bogor. Telepon 021.29618766



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : B/ 776 /III/2017
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin
Pengambilan Data dan
Pelaksanaan Penelitian

Bogor, 17 Maret 2017

Kepada

Yth. Pejabat tersebut dalam lampiran
di
Tempat

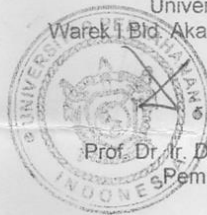
1. Dasar:

- a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
- b. Kalender Akademik Program Studi Manajemen Bencana Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2015/2016.

2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:

- a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
 - b. Mahasiswa Program Studi Manajemen Bencana Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan atas nama Mochamad Guntur, NIM: 120150203020, nomor HP: 081296589772, email: mochiguntur@gmail.com, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Gerakan Solidaritas Masyarakat Menengah dalam Menghadapi Bencana Banjir (Studi Kasus Perumahan Ikatan Koperasi Pegawai Negeri)."
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon diizinkan mahasiswa tersebut untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat yang ditunjuk.
4. Demikian mohon menjadi periksa.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng
Pembina Utama IV/e

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Warek Unhan
3. Dekan FMP Unhan
4. Karo Aka dan Kemahasiswaan Unhan.

Lampiran Surat Rektor Unhan
 Nomor : BI 776 / III / 2017
 Tanggal : 27 Maret 2017

DAFTAR PEJABAT

1. Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta
3. Dandim 0504/ Jakarta Selatan
4. Lurah Kelurahan Bintaro, Jakarta Selatan
5. Ketua Karang Taruna Kelurahan Bintaro
6. Ketua RW. 04 Kelurahan Bintaro
7. Ketua RT. 01 Kelurahan Bintaro
8. Ketua RT. 04 Kelurahan Bintaro
9. Ketua RT. 05 Kelurahan Bintaro
10. Tokoh Masyarakat Perumahan IKPN Bintaro

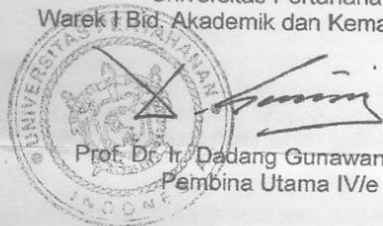
Note:

Untuk wilayah IKPN baru Bintaro
 mendapat 5 RT yaitu:

- RT 01
- RT 02
- RT 03
- RT 04
- RT 05

Ditama kelima wilayah tersebut
 akan ke wilayah lama kemudian
 bangun.

a.n. Rektor
 Universitas Pertahanan
 Warel I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng
 Pembina Utama IV/e

(Dit. U.S.)

PERDA REVISI SEGMENT TERHADAP PERUMAHAN IKPN



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1861 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN NORMALISASI
KALI PESANGGRAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2013 telah diterapkan penguasaan perencanaan/ peruntukan bidang tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum rencana trace Normalisasi Kali Pesanggrahan;
 - b. bahwa pelaksanaan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih terdapat sisa tanah yang belum selesai diproses pengadaannya sampai dengan jangka waktu berlaku Peraturan Gubernur dimaksud berakhir, sehingga untuk kelanjutan pelaksanaan normalisasi kali dimaksud, perlu memperbaharui penetapan lokasinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Normalisasi Kali Pesanggrahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Ppp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN NORMALISASI KALI PESANGGRAHAN.

KESATU : Menetapkan lokasi untuk normalisasi Kali Pesanggrahan seluas ± 83,38 ha (lebih kurang delapan puluh tiga koma tiga delapan hektar) yang terletak di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kelurahan Pondok Pinang, Kelurahan Grogol Selatan, Kelurahan Cipulir, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Pesanggrahan, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kelurahan Kebon Jeruk, Kelurahan Kedoya Utara, Kelurahan Kedoya Selatan, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Kembangan Selatan, Kelurahan Meruya Utara, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat dengan lebar sungai bervariasi yaitu 40 m (empat puluh meter), 45 m (empat puluh lima meter), 22 m (dua puluh dua meter), 15 m (lima belas meter), 48 m (empat puluh delapan meter), 42 m (empat puluh dua meter), 30 m (tiga puluh meter), 20 m (dua puluh meter), B>90 m (B lebih besar dari sembilan puluh meter) dan lebar jalan inspeksi 10 m (sepuluh meter), 12 m (dua belas meter), 6 m (enam meter), 7 m (tujuh meter), 8 m (delapan meter), 20 m (dua puluh meter), 26 m (dua puluh enam meter), 19 m (sembilan belas meter), 15 m (lima belas meter), 14 m (empat belas meter), 7,5 m (tujuh koma lima meter), 9 m (sembilan meter), 18 m (delapan belas meter), 24 m (dua puluh empat meter), 5 m (lima meter), dijelaskan dengan tanda garis tebal pada gambar peta situasi skala 1 : 1.000 dan terdapat revisi pada segmen perumahan/komplek IKPN Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama (lembar 27, 28 dan 29) dan segmen Sekolah Polisi Wanita Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama (lembar Nomor 34, 35 dan 36) dengan Nomor Pemeriksaan 143/S/PSR/DPK/VIII/2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini sedangkan untuk segmen lainnya mengacu pada gambar peta dengan Nomor Pemeriksaan 512/B/PPSK/DTR/V/2013 dan 512/S/PPSK/DTR/V/2013.

3

- KEDUA : Dalam rangka normalisasi Kali Pesanggrahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pengadaan tanah termasuk pengosongan terhadap bangunan, hunian dan benda-benda lain yang berada di atasnya serta mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung.
- KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- KEEMPAT : Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta wajib mengumumkan/mempublikasikan rencana normalisasi Kali Pesanggrahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi
- KELIMA : Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, maka Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta wajib segera menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta melaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- KEENAM : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2012 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Normalisasi Kali Pesanggrahan, dengan Nomor Pemeriksaan 512/B/PPSK/DTR/V/2013 dan Nomor 512/S/PPSK/DTR/V/2013 dinyatakan masih berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2015

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

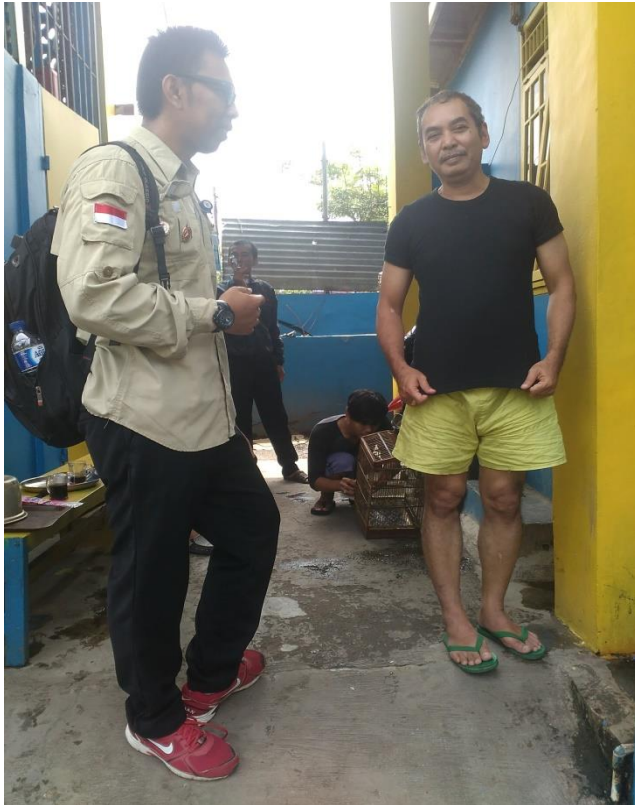


BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta

4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Selatan
9. Walikota Jakarta Barat
10. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Camat Kebayoran Lama
15. Camat Pesanggrahan
16. Camat Cilandak
17. Camat Kebon Jeruk
18. Camat Kembangan
19. Lurah Kebayoran Lama Selatan
20. Lurah Pondok Pinang
21. Lurah Grogol Selatan
22. Lurah Cipulir
23. Lurah Kebayoran Lama Utara
24. Lurah Pesanggrahan
25. Lurah Bintaro
26. Lurah Ulujami
27. Lurah Lebak Bulus
28. Lurah Sukabumi Selatan
29. Lurah Kebon Jeruk
30. Lurah Kedoya Utara
31. Lurah Kedoya Selatan
32. Lurah Kelapa Dua
33. Lurah Kembangan Selatan
34. Lurah Meruya Utara
35. Lurah Srengseng

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan bapak Yudi
RT 01 RW 05
di Pompa Air IKPN



Wawancara dengan bapak Narso
selaku penjaga Pompa Air di
Pompa Air IKPN



Wawancara dengan Bapak Dankeu RW 05
di Kediaman



Wawancara dengan Bapak Suhaeli RT 04 RW 05
di Kediaman



Meninjau bantaran kali Pesangrahan bersama bapak Suhaeli RT
04 RW 05



Jaring sampah di pos penjaga bantaran sungai Pesangrahan
di dalam wilayah IKPN



Wawancara dengan Bapak RT Rusdaya RT 03 RW 05
di kediaman



Wawancara dengan Bapak Jamaludi Rahim Selaku Kasi Pemerintahan
di Kantor Kelurahan Bintaro



Wawancara dengan Bapak Muhidin selaku PPSU kelurahan dan Ibu Ely selaku Kasi kesbang di Kelurahan Bintaro

DAFTAR PIKET SIAGA BANJIR
KELURAHAN BINTARO KECAMATAN PESANGGRAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

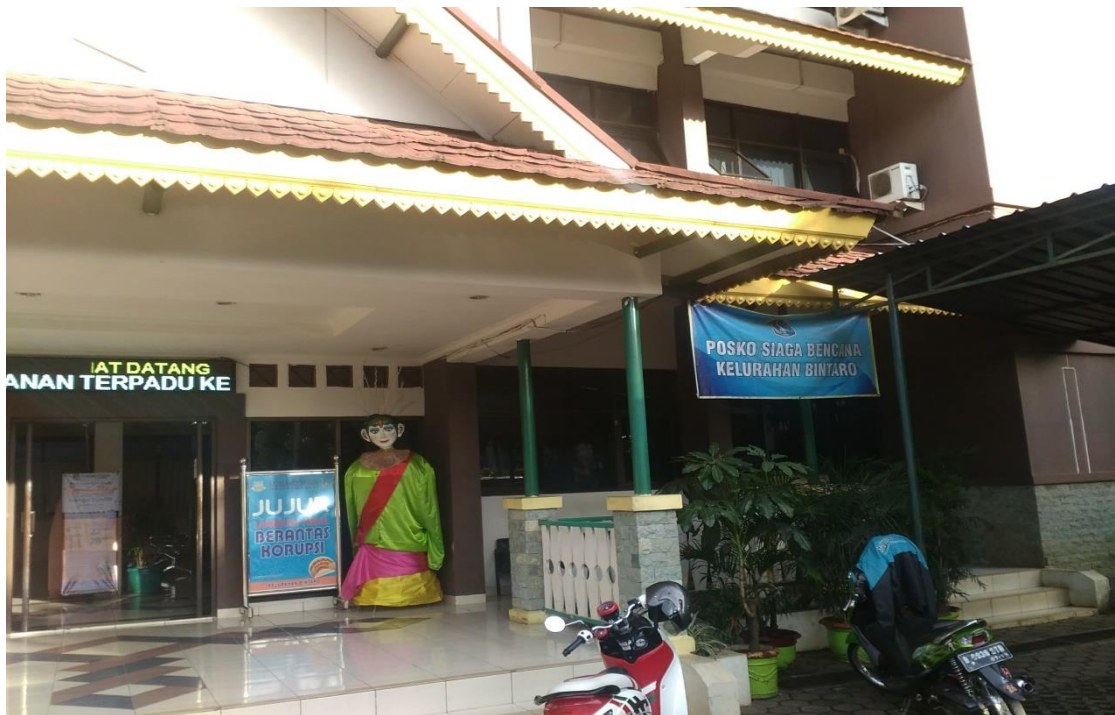
		MARET																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TEAM 1																																
1.	Maryono (08128526819)																															
	Rita (081286787140)																															
	Umi Kulsum (0838 95522650)																															
	Sri Mulyono (081287590124)																															
TEAM 2																																
2.	Jamaluddin R. (081282001122)																															
	Maris Saputra (085770989137)																															
	Wahyu Tri P. (082110935535)																															
	Mulyadi (089601567466)																															
TEAM 3																																
3.	Endang Sri P (08567774259)																															
	Neng Imawati (081282940088)																															
	Diana Sari (08567274632)																															
	Lennimina L. (081316579107)																															
	Agus Martano (081311226997)																															
TEAM 4																																
4.	Titin Suprihatin (081546127488)																															
	Idlmanina S. (08561248560)																															
	Asri Pratiwi Paryono (089646732771)																															
TEAM 5																																
5.	Alam (081384371006)																															
	Didin Syarifudin (0857705448360)																															
	Dwi Usetyo R. (0818605067)																															
	Elga Desma (08567274632)																															
	Ricky Maulana (081287590124)																															

Jakarta 01 Maret 2017
LURAH BINTARO
DIMAS PRAYUYUDI
NIP. 198711092006031011

Daftar Piket Siaga Banjir Kelurahan Bintaro



Kantor Kelurahan Bintaro, Jakarta Selatan



Posko Siaga Banjir di Kantor Kelurahan Bintaro



Wawancara dengan Bapak Adi Setyo P (Staff Pemberdayaan Masyarakat), Bapak Embay S (Kasi Kesiapsiagaan), Bapak Entus selaku BPBD





Isi perangkat bantuan untuk balita bagi bencana banjir dari BPBD DKI Jakarta



Makanan tambahan gizi bagi korban bencana banjir dari BPBD DKI Jakarta



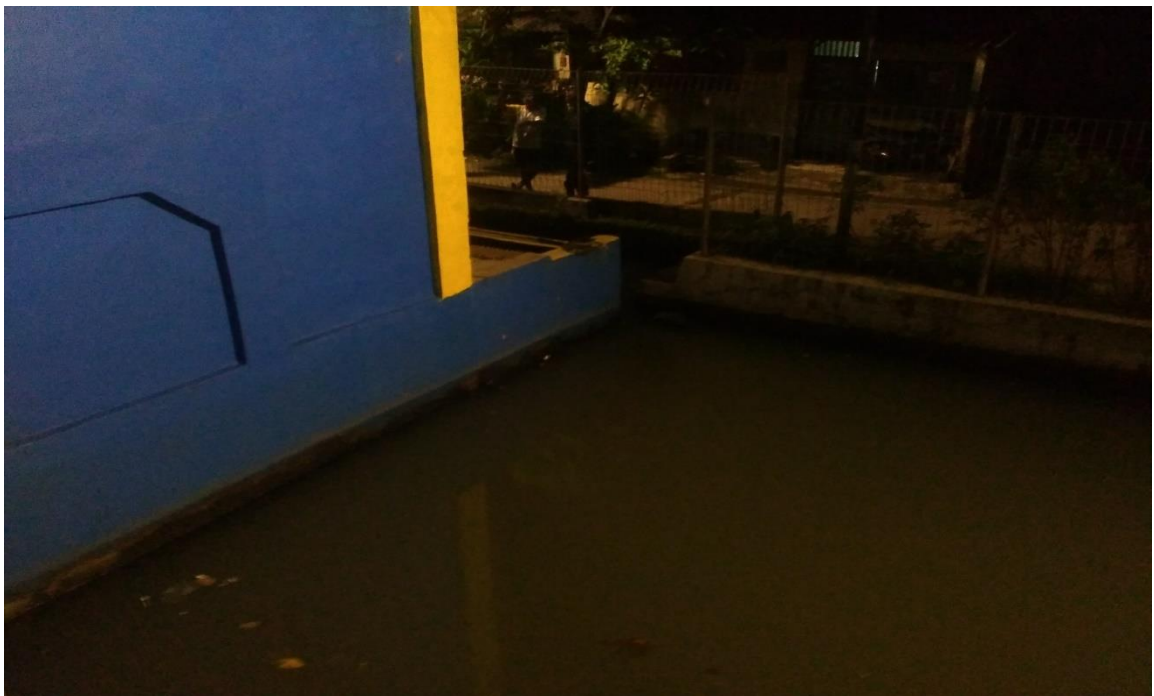
lokasi Evakuasi saat bencana banjir terjadi yang berada ditengah kompleks IKPN



Wawancara Bersama Bapak Hartono selaku kepala penjaga pompa di Gedung Pompa IKPN Bintaro



Kondisi tembok kali yang pecah



Kolam bak penampung air sementara di Pompa Air



Wawancara Bersama Bapak Hartono selaku kepala penjaga pompa di Gedung Pompa IKPN Bintaro



Kondisi Mesin Pompa Air di Gedung Pompa IKPN Bintaro



Mesin Pompa utama di Gedung Pompa IKPN Bintaro



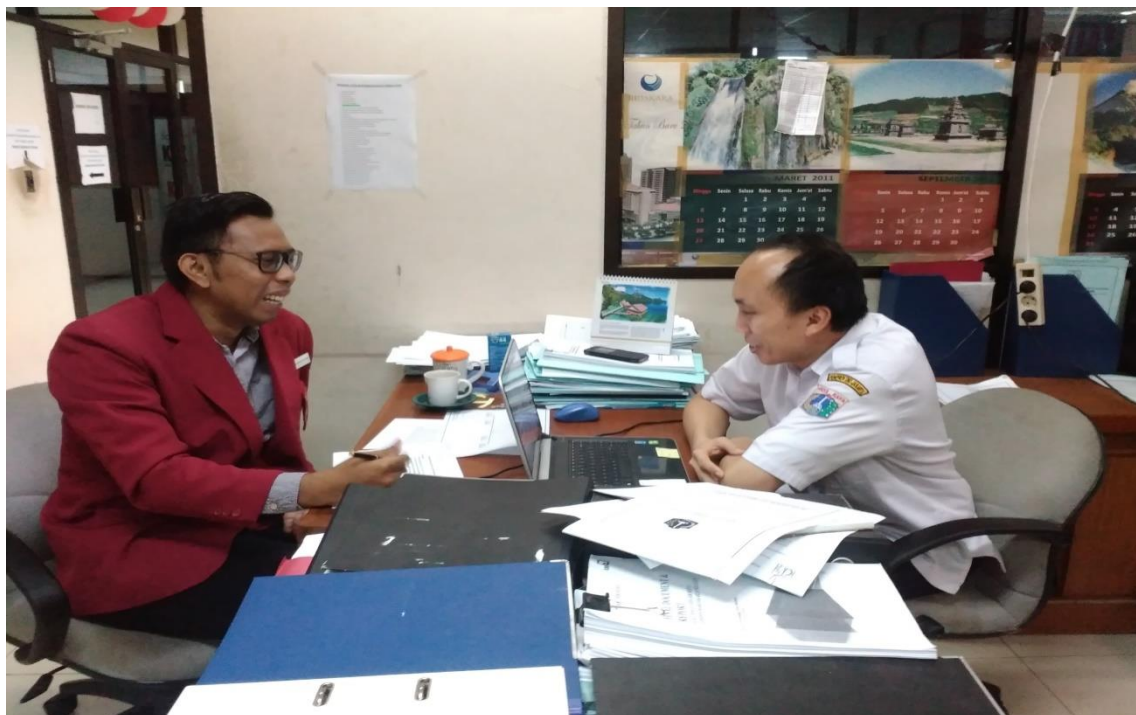
Kondisi Bak penampungan air sementara di Gedung Pompa IKPN
Bintaro



Early Warning System (EWS)
yang dimiliki oleh petugas
penjaga Pompa air



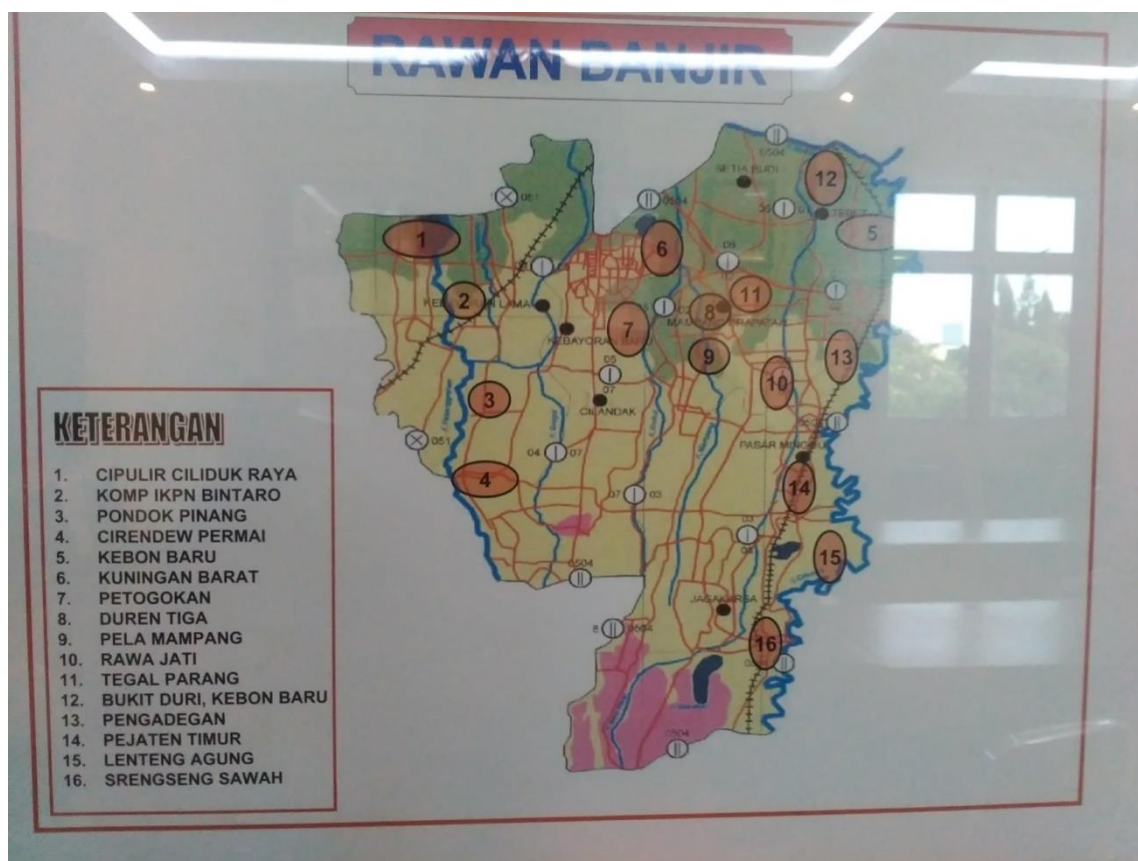
Alat Ukur (meteran) ketinggian
air yang berada di Gedung
Pompa IKPN Bintaro



Wawancara dengan Bapak Roby Dwi Mariyansyah selaku Dinas Tata Air
Walikota Jakarta Selatan



Wawancara Dengan Bapa Mayor Inf Sunarko SH MM selaku Kasdim
0504 Jakarta Selatan



Peta Rawan Bencana yang terdapat di KODIM 0504 Jakarta Selatan